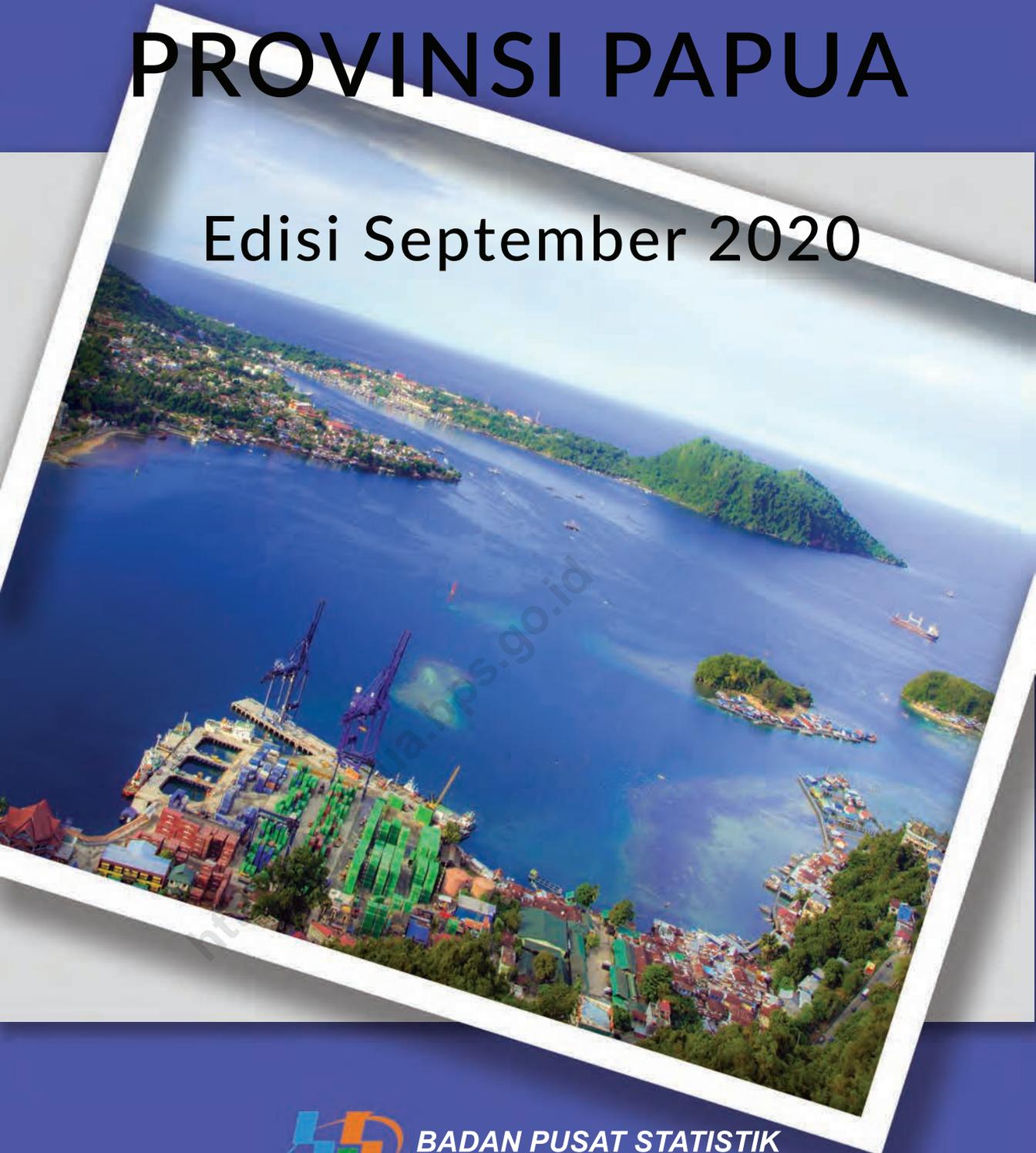


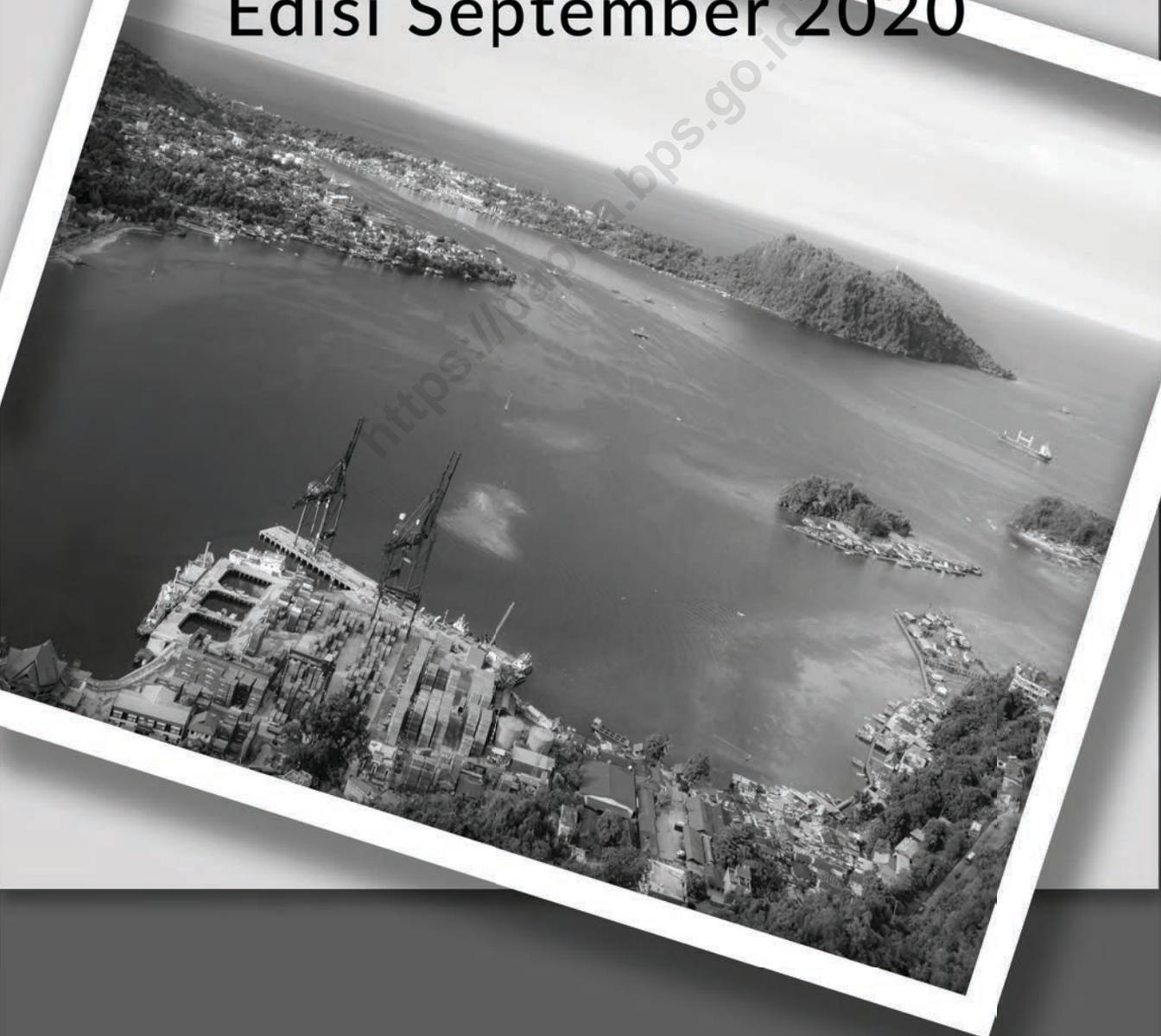
INDIKATOR PENTING PROVINSI PAPUA

Edisi September 2020



INDIKATOR PENTING PROVINSI PAPUA

Edisi September 2020



©Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

INDIKATOR PENTING PROVINSI PAPUA
EDISI SEPTEMBER 2020

ISSN : 2477-4472
Katalog BPS : 1103009.94
No. Publikasi : 94550.2016

Naskah : Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Badan Pusat Statistik Provinsi Papua
Editor : Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Badan Pusat Statistik Provinsi Papua
Tata Letak : Bidang Integrasi Pengolahan Data dan Diseminasi Statistik
Badan Pusat Statistik Provinsi Papua
Kover : Bidang Integrasi Pengolahan Data dan Diseminasi Statistik
Badan Pusat Statistik Provinsi Papua
Dicetak Oleh : CV. Karya Klabat

Jayapura : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, 2020
viii + 59 halaman; 18,2 cm x 25,7 cm (B5 JIS)

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

HEADLINE

NILAI TUKAR PETANI



Agustus 2020

NTP	103,13
NTUP	105,73
Inflasi Pedesaan	-0,02%

01

ANGKUTAN LAUT

Juli 2020



Penumpang (org)		Barang (ton)	
Berangkat	7.758	Muat	12.049
Datang	3.797	Bongkar	94.369

02

EKSPOR IMPOR

Agustus 2020 (Juta US\$)



Ekspor	196,04
Impor	10,84
Neraca Perdagangan	185,2

03

INFLASI

Agustus 2020



Gabungan 3 kota	-0,20%
IHK	104,86

04

PRAKATA

Indikator Penting Provinsi Papua ini diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua. Data dan informasi yang dimuat merupakan perkembangan data terbaru yang dihimpun dan dirilis BPS, yang merupakan hasil pendataan langsung dan hasil kompilasi produk administrasi pemerintah yang dilakukan secara teratur (bulanan, triwulanan dan tahunan) oleh jajaran BPS di seluruh Provinsi Papua.

Publikasi ini dimaksudkan untuk melengkapi bahan penyusunan kebijakan dan evaluasi kemajuan yang dicapai baik di bidang sosial maupun bidang ekonomi. Indikator Penting Provinsi Papua ini mencakup antara lain: perkembangan bulanan Inflasi, Transportasi, Nilai Tukar Petani (NTP), Inflasi Pedesaan, Ekspor-Import, Industri manufaktur, Pertumbuhan Ekonomi, Ketenagakerjaan, Kemiskinan, Ketimpangan Pendapatan, IKK, IPM, serta Produksi Tanaman Pangan.

Data yang lebih luas dan spesifik untuk sektor tertentu, tersedia dalam publikasi BPS lainnya atau dapat diperoleh melalui website <http://papua.bps.go.id>. Semoga buku ini bermanfaat bagi seluruh penggunanya.

Jayapura, September 2020
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI PAPUA,



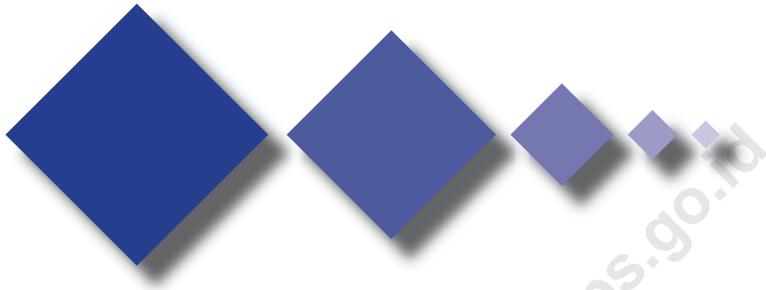
Adriana Helena Carolina SE, M.M



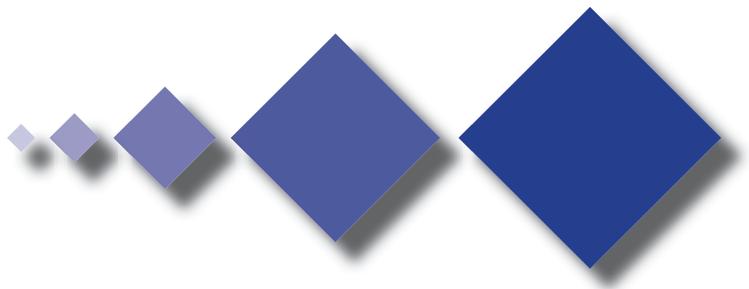
DAFTAR ISI

Prakata	v
Daftar Isi	vii
Sosial dan Kependudukan	
Penduduk	3
Kemiskinan	6
Ketenagakerjaan	9
Indeks Pembangunan Manusia	11
Indeks Kebahagiaan	14
Potensi Desa (PODES)	16
Ekonomi dan Perdagangan	
Inflasi (update)	21
Produk Domestik Regional Bruto	24
Ekspor (update)	27
Impor (update)	29
Nilai Tukar Petani (update)	31
Angkutan Laut (update)	33
Industri Manufaktur	35
Indeks Tendensi Konsumen	37
Pertanian	
Tanaman Pangan	42
Indikator Lainnya	
Informasi Lainnya	46





SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN



PENDUDUK

Jumlah penduduk Papua tahun 2019 mencapai 3.379.302 jiwa

Awalnya, penduduk dipandang hanya sebagai input atau alat dalam pembangunan, bukan sebagai sasaran pembangunan. Saat itu fokus pembangunan antara lain hanya pada modal, pendapatan, dan pertumbuhan ekonomi.

Di tahun 1990, setelah beberapa dekade pembangunan berlalu, ditemukan fakta bahwa kenaikan pendapatan nasional belum tentu dibarengi dengan perbaikan kualitas hidup penduduknya. Sejak saat itu, menjadi jelas bahwa selain sebagai alat pembangunan, penduduk juga merupakan sasaran pembangunan.

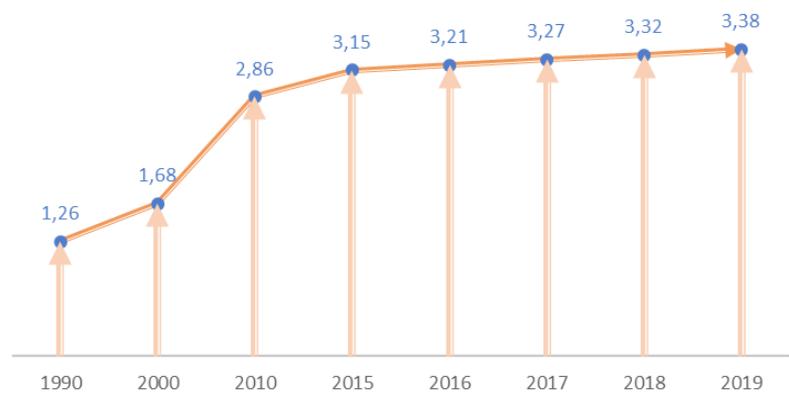
Oleh karena itulah fokus pembangunan berpindah dari kebijakan yang terfokus pada pendapatan nasional menjadi kebijakan yang terpusat pada pembangunan manusia (Harry Seldadyo, UNDP).

Hasil proyeksi penduduk berdasarkan Sensus Penduduk 2010 (SP2010) menunjukkan bahwa di tahun 2019, jumlah penduduk Papua mencapai 3.379.302 jiwa. Jumlah tersebut meningkat 1,76 persen dibandingkan jumlah penduduk di tahun 2018.

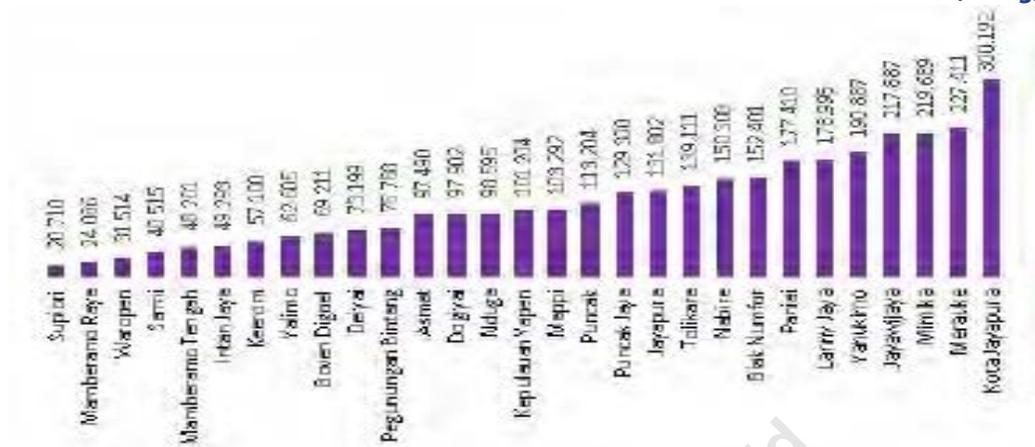
Menurut penyebarannya, jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kota Jayapura yang mencapai 300.192 jiwa, sementara yang paling sedikit adalah Kabupaten Supiori dengan jumlah penduduk 20.710 jiwa.

Dengan luas wilayah mencapai 316.553,07 km², kepadatan

Gambar 1. Perkembangan Jumlah Penduduk Provinsi Papua 1990, 2000, 2010, 2015–2019 (juta orang)



Gambar 2. Persentase Penduduk Menurut Kabupaten/Kota 2019 (orang)



penduduk di Provinsi Papua hanya 10 jiwa/km². Disparitas kepadatan penduduk antar kabupaten/kota sangat tinggi. Kepadatan penduduk paling tinggi terjadi di Kota Jayapura sebagai ibukota Provinsi Papua yang mencapai 303-304 jiwa/km²; sedangkan yang terendah adalah di Mamberamo Raya yang hanya sekitar 8 jiwa per km².

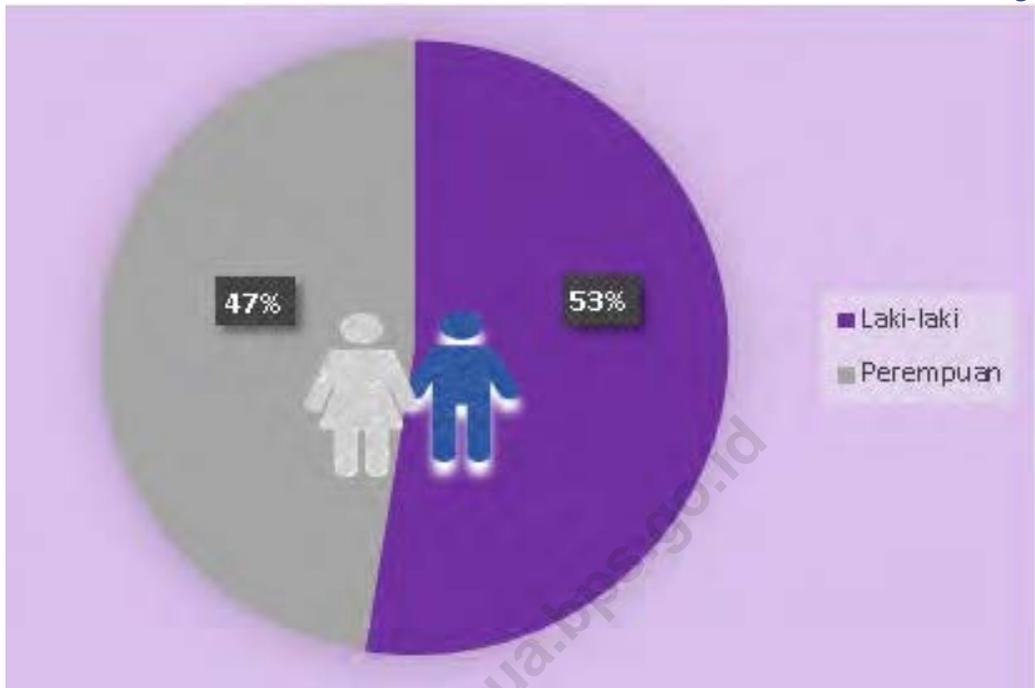
Untuk melihat perbandingan antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan di suatu wilayah dapat digunakan rasio jenis kelamin. Rasio jenis kelamin di Provinsi Papua tahun 2019 sebesar 110,60. Ini berarti untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat sebanyak 110 hingga 111 penduduk laki-laki.

Menurut komposisi penduduk berdasarkan kelompok umurnya, sebagian besar penduduk Papua berada dalam kelompok umur muda. Hal ini ditunjukkan dari bentuk piramida penduduk Papua yang termasuk dalam kategori ekspansif (piramida penduduk muda) yang mengindikasikan cukup tingginya tingkat kelahiran dan pertumbuhan penduduk di Papua.

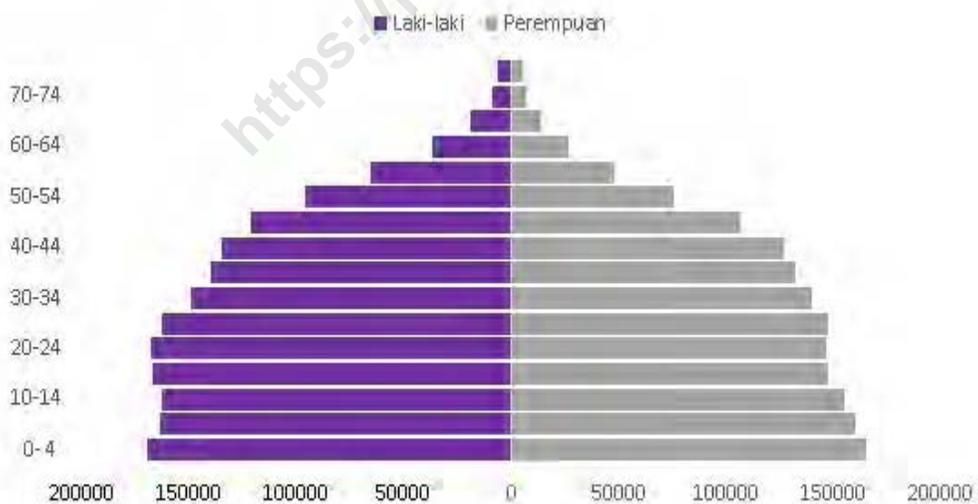
Dasar piramida yang cukup lebar menunjukkan relatif besarnya rasio ketergantungan penduduk muda, sementara puncak piramida yang menciut tajam menunjukkan rendahnya rasio ketergantungan penduduk tua. Rasio ketergantungan menunjukkan beban atau banyaknya penduduk usia nonproduktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) yang harus ditanggung secara ekonomi oleh penduduk usia produktif (15-64 tahun).

Secara umum, rasio ketergantungan di Papua tahun 2019 sebesar 44,32 yang berarti untuk setiap 100 penduduk usia produktif menanggung beban sekitar 45 penduduk usia nonproduktif. Selama hampir dua dekade terakhir (1999-2018) kondisi kesejahteraan masyarakat Papua kian membaik. Tercatat persentase penduduk miskin menurun secara signifikan sebesar 27,32 persen poin dari 54,75 persen pada Maret 1999 menjadi 27,43 pada September 2018.

Gambar 3. Persentase Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Papua 2019 (orang)



Gambar 4. Piramida Penduduk Provinsi Papua 2019 (orang)



KEMISKINAN

*Persentase penduduk miskin Provinsi pada Maret 2020
turun menjadi 26,64 persen*

Secara umum, pada periode Maret 2012 - Maret 2020 tingkat kemiskinan mengalami penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentase. Persentase penduduk miskin pada periode tersebut turun sebesar 4,47 persen poin, yaitu dari 31,11 persen atau berjumlah 950,52 ribu jiwa pada Maret 2012 menjadi 26,64 persen atau 911,37 ribu jiwa pada Maret 2020.

Selama enam bulan terakhir persentase penduduk miskin Papua justru mengalami peningkatan sebesar 0,09 persen poin yaitu 26,55 persen pada September 2019 menjadi 26,64 persen pada Maret 2020. Berbeda lagi jika dibandingkan dengan Maret 2019, terjadi penurunan 0,11 poin persen.

Menurut tipe daerahnya, penduduk miskin terkonsentrasi di daerah perdesaan, dimana pada Maret 2020 terdapat 867,74 ribu jiwa atau 35,50 persen penduduk miskin tinggal di perdesaan, sedangkan di perkotaan hanya sebesar 43,63 ribu jiwa atau 4,47 persen.

Jika dibandingkan dengan kondisi pada periode sebelumnya (September 2019), terdapat penurunan persentase penduduk miskin di daerah perkotaan sebesar 0,06 persen poin. Untuk daerah perdesaan persentase penduduk miskin naik sebesar 0,14 persen poin.

Pada Maret 2020 menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di 3 (tiga) provinsi di Kawasan Timur Indonesia yaitu Provinsi Papua, Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur merupakan wilayah dengan persentase penduduk miskin terbesar yaitu secara berurutan 26,64 persen, 21,37 persen dan 20,90 persen. Sedangkan 3 (tiga) provinsi dengan persentase penduduk miskin terendah berada di Provinsi Bali sebesar 3,79 persen, diikuti oleh Provinsi Kalimantan Selatan 4,38 persen dan Provinsi Bangka Belitung dengan persentase penduduk miskin sebesar 4,53 persen.

Garis Kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak

**Gambar 5. Persentase Penduduk Miskin Provinsi Papua
Maret 2012 – Maret 2020 (persen)**



miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan (GK). Seiring dengan kenaikan harga (inflasi) yang terjadi dari tahun ke tahun, besarnya GK juga mengalami peningkatan. Garis kemiskinan di Provinsi Papua Maret 2020 adalah Rp562.992,-. Selama September 2019 - Maret 2020 terjadi kenaikan GK, yaitu Rp5.756,- atau sebesar 1,03 persen.

Menurut tipe daerahnya, GK daerah perkotaan pada Maret 2020 adalah sebesar Rp611.115,-. Nilai ini lebih tinggi dibanding GK perdesaan yang sebesar Rp542.695,-. Hal ini berarti biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal yang layak (basic needs) untuk makanan dan bukan makanan lebih besar di perkotaan daripada di perdesaan.

Jika dilihat pada periode September 2019-Maret 2020, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Kearifan Kemiskinan (P2) Provinsi Papua menunjukkan kecenderungan naik. Indeks Kedalaman Kemiskinan naik dari 6,070 pada September 2019 menjadi 6,157 pada Maret 2020. Demikian pula dengan Indeks Kearifan Kemiskinan naik dari 1,984 menjadi 2,077 pada periode yang sama. Kenaikan nilai kedua indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin menjauhi garis kemiskinan dan ketimpangan antar penduduk miskin semakin bertambah dibanding periode sebelumnya.

**Tabel 1. Garis Kemiskinan Menurut Daerah Provinsi Papua
Sep 2012-Maret 2020 (rupiah)**

	Garis Kemiskinan (Per Kapita Per Bulan)		
	Kota	Desa	K+D
(1)	(2)	(3)	(4)
Sep-12	344 415	281 022	297 502
Mar-13	362 401	298 395	315 025
Sep-13	387 789	322 079	339 096
Mar-14	404 944	338 206	355 380
Sep-14	408 419	340 846	358 204
Mar-15	440 697	388 095	402 031
Sep-15	445 057	392 446	406 385
Mar-16	466 985	412 991	427 176
Sep-16	479 294	425 264	440 021
Mar-17	498 368	441 287	457 541
Sep-17	508 403	446 994	464 056
Mar-18	542 542	482 000	499 643
Sep-18	566 903	499 615	518 811
Mar-19	588 744	520 117	540 099
Sep-19	603 458	538 088	557 236
Mar-20	611 115	542 695	562 992

**Gambar 6. Garis Kemiskinan Makanan dan Non Makanan Provinsi Papua
Sep 2012-Mar 2020 (rupiah)**



KETENAGAKERJAAN

Nilai TPAK dan TPT Papua pada Februari 2020 masing-masing sebesar 75,23 persen dan 3,62 persen

Pada Februari 2020, jumlah angkatan kerja dan penduduk yang bekerja di Papua menurun dibandingkan kondisi Agustus 2019. Jumlah angkatan kerja mencapai 1,83 juta orang mengalami penurunan sekitar 0,65 persen dibanding kondisi Agustus 2019 sebanyak 11.794.

Jumlah angkatan kerja disertai dengan naiknya jumlah penduduk usia kerja membuat Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Februari 2020 mengalami penurunan. Sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Papua pada Februari 2020 menurun 0,03 persen dari kondisi Agustus 2019.

Jumlah pengangguran di Papua pada Februari 2020 sebanyak 66.296 orang. Jumlah pengangguran bertambah 4.411 orang dibandingkan dengan keadaan tahun lalu pada periode sama.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Papua pada Februari 2020 adalah 3,62 persen. Angka pengangguran di Papua masih berada jauh dibawah angka pengangguran nasional sebesar 4,99 persen. TPT tertinggi di Papua berada pada tingkat

**Tabel 2. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama Provinsi Papua
Februari 2018 – Februari 2020**

Jenis Kegiatan Usaha	2018		2019		2020
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penduduk 15+	2.332.383	2.320.862	2.378.923	2.394.887	2.433.130
Angkatan Kerja	1.851.486	1.835.963	1.808.848	1.842.203	1.830.409
Bekerja	1.797.668	1.777.207	1.746.963	1.775.030	1.764.113
Penganggur	53.818	58.756	61.885	67.173	66.296
Bukan Angkatan Kerja	480.897	498.899	570.075	552.684	602.721
Sekolah	193.332	176.043	220.158	188.438	217.936
Mengurus RT	243.493	256.249	277.906	293.959	316.567
Lainnya	44.072	52.607	72.011	70.287	68.218
TPAK (%)	79,38	79,11	76,04	76,92	75,23
TPT (%)	2,91	3,20	3,42	3,65	3,62

Sekolah Menengah Kejuruan yang mencapai 10,19 persen. Penganggur dengan tingkat Pendidikan sekolah lainnya yang memiliki TPT diatas lima persen yakni penganggur dengan tingkat Sekolah Menengah Atas (6,49 persen) dan tingkat Pendidikan Diploma keatas (11,77 persen).

Pada kondisi Februari 2020, Pekerja Keluarga/Tidak Dibayar merupakan status pekerjaan yang paling banyak

disandang oleh penduduk pekerja di Provinsi Papua (29,23 persen), disusul Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/ Pekerja Keluarga/Tidak Dibayar (28,49 persen).

Gambar 7. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Provinsi Papua, Februari 2020



INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

IPM Provinsi Papua tahun 2019 sebesar 60,84 dan status pembangunan berubah dari kategori rendah menjadi sedang

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people's choice*). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan antara lain dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Oleh karena itu, IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (*masyarakat/penduduk*). IPM diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan metode penghitungan direvisi pada tahun 2010. BPS mengadopsi perubahan metodologi penghitungan IPM yang baru pada tahun 2014 dan melakukan *backcasting* sejak tahun 2010.

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*); pengetahuan (*knowledge*); dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan dengan Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi.

Dimensi pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Dimana Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal, dan Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Sementara itu, standar hidup layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan,

Gambar 8. Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Nasional dan Papua Tahun 2010 – 2019



yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli.

Secara umum, pembangunan manusia Papua terus mengalami kemajuan selama periode 2010 hingga 2019. IPM Papua meningkat dari 54,45 pada tahun 2010 menjadi sebesar 60,84 di tahun 2019. Selama periode tersebut, IPM di provinsi paling timur Indonesia ini rata-rata tumbuh sebesar 1,30 persen.

Pencapaian pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota di Papua pada tahun 2019 masih belum merata. Dari 29 kabupaten/kota hanya satu kabupaten/kota dengan status IPM “sangat tinggi” yaitu Kota Jayapura. 3 kabupaten/kota dengan status IPM “tinggi” yaitu Jayapura, Biak Numfor dan Mimika. Sedangkan Merauke, Nabire, Kepulauan Yapen, Sarmi, Keerom, Waropen, Supiori dan Boven Digoel dengan IPM berstatus “sedang”. Sementara itu sebagian besar kabupaten berstatus “rendah” sebanyak 17 kabupaten yaitu Jayawijaya, Paniai, Puncak Jaya, Mappi, Asmat, Yahukimo,

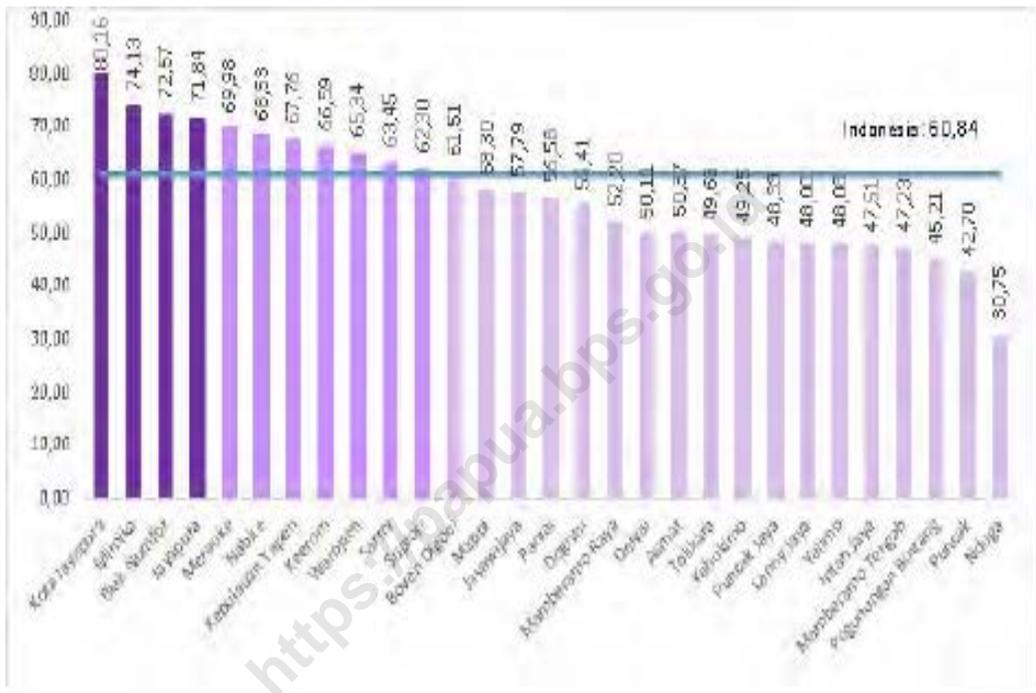
Pegunungan Bintang, Tolikara, Nduga, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, Yalimo, Puncak, Dogiyai, Intan Jaya, Deiyai dan Mamberamo Raya.

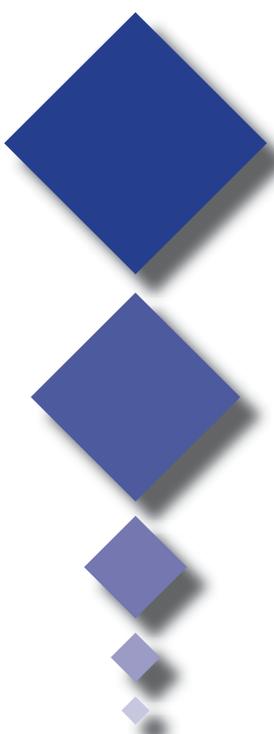
Kabupaten Nduga merupakan kabupaten dengan IPM terendah di Papua hanya sebesar 30,75. Sedangkan Kota Jayapura sebagai ibukota Provinsi Papua tercatat memiliki pembangunan manusia satu tingkat ke level sangat tinggi dibandingkan kabupaten lainnya di Papua. Pada tahun 2019, IPM Kota Jayapura mencapai 80,16.

Peningkatan IPM di tingkat provinsi juga tercermin pada level kabupaten/kota. Selama periode 2018 hingga 2019, seluruh kabupaten/kota di Papua mengalami kenaikan IPM. Top movers IPM di Papua (kabupaten/kota dengan kemajuan pembangunan manusia paling cepat), yaitu: Kabupaten Nduga (4,52 persen), Pegunungan Bintang (2,24 persen), dan Puncak (2,13 persen). Kemajuan pembangunan manusia di ketiga kabupaten tersebut didorong oleh peningkatan dimensi pendidikan.

Secara nasional, peningkatan IPM tercermin pada level provinsi. Selama periode 2018 hingga 2019, seluruh provinsi mengalami peningkatan IPM. Pada periode ini, provinsi dengan kemajuan pembangunan manusia paling cepat yaitu : Provinsi Papua Barat (1,51 persen), Maluku Utara (1,39 persen), serta Nusa Tenggara Timur dan Papua yang memiliki pertumbuhan sama (1,30 persen).

Gambar 9. Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Papua, 2019





INDEKS KEBAHAGIAAN

Indeks Kebahagiaan Provinsi Papua tahun 2017 sebesar 67,52

Indeks Kebahagiaan Provinsi Papua merupakan indeks komposit yang dihitung secara tertimbang menggunakan dimensi dan indikator dengan skala 0-100. Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan tingkat kehidupan penduduk yang semakin bahagia. Sebaliknya, semakin rendah nilai indeks maka semakin merasa tidak bahagia.

Metode pengukuran Indeks Kebahagiaan tahun 2017 mengalami perubahan dari pengukuran sebelumnya pada tahun 2014 karena adanya penambahan cakupan indeks. Pada tahun 2014, Indeks Kebahagiaan hanya menggunakan Dimensi Kepuasan Hidup. Sedangkan pada tahun 2017, dalam indeks kebahagiaan ditambahkan Dimensi Perasaan (Affect) dan Dimensi Makna Hidup (Eudaimonia). Perubahan lainnya yaitu pada tahun 2017, Dimensi Kepuasan Hidup terbagi menjadi 2 (dua) subdimensi yaitu Subdimensi Kepuasan Hidup Personal dan Subdimensi Kepuasan Hidup Sosial.

Indeks Kebahagiaan Provinsi Papua tahun 2017 yang dihitung dengan menggunakan Metode 2014, lebih tinggi dibanding tahun 2014. Pada tahun 2017 sebesar 67,52 sedangkan pada tahun 2014 sebesar 60,97.

Indeks Kebahagiaan Provinsi Papua tahun 2017 sebesar 67,52. Besarnya indeks masing-masing dimensi penyusun Indeks Kebahagiaan Provinsi Papua, yaitu: (1) Indeks Dimensi Kepuasan Hidup sebesar 68,42, dengan masing-masing Subdimensi Kepuasan Hidup Personal sebesar 63,04 dan Subdimensi Kepuasan Hidup Sosial sebesar 73,80; (2) Indeks Dimensi Perasaan (Affect) sebesar 68,42; dan (3) Indeks Dimensi Makna Hidup (Eudaimonia) sebesar 69,98. Seluruh indeks diukur pada skala 0-100.

Berdasarkan indikator penyusunnya, indeks indikator tertinggi adalah Kepuasan terhadap Kondisi Keamanan yaitu sebesar 75,79 yang merupakan Subdimensi Kepuasan Hidup Sosial. Sementara indeks indikator terendah adalah Pendidikan dan Keterampilan 53,54 yang merupakan Subdimensi Kepuasan Hidup Personal.

Tabel 3. Indeks Kebahagiaan dan Indeks Dimensi Menurut Karakteristik 2017

Karakteristik	Indeks Kebahagiaan	Penyusun Indeks Kebahagiaan					
		Indeks Dimensi Kepuasan Hidup			Total	Indeks Dimensi Perasaan (Affect)	Indeks Dimensi Makna Hidup (Eudaimonia)
		Indeks Subdimensi Kepuasan Hidup					
		Personal	Sosial				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
Klasifikasi Wilayah							
Perkotaan	73,51	71,86	78,09	74,97	68,03	77,02	
Perdesaan	65,29	59,77	72,21	65,99	62,25	67,37	
Jenis Kelamin							
Laki-Laki	66,67	61,86	73,17	67,51	63,13	69,06	
Perempuan	70,36	67,04	75,92	71,48	66,13	73,10	
Status Perkawinan							
Belum Menikah	69,04	65,68	73,39	69,54	65,26	72,00	
Menikah	67,51	63,15	73,87	68,51	63,77	69,93	
Cerai Hidup	66,22	62,65	75,25	68,95	57,60	71,33	
Cerai Mati	67,37	61,08	72,86	66,97	65,15	69,82	
Kelompok Umur							
≤ 24 Tahun	67,22	62,63	74,02	68,32	61,41	71,41	
25-40 Tahun	67,06	62,60	73,03	67,82	63,49	69,55	
41-64 Tahun	68,03	63,54	74,66	69,10	64,37	70,29	
≥ 65 Tahun	67,61	63,13	72,82	67,97	62,86	71,58	
Kedudukan Dalam Rumah Tangga:							
Kepala Rumah Tangga	66,77	61,84	73,23	67,53	63,23	69,24	
Pasangan KRT	71,86	70,06	77,14	73,60	67,23	74,31	
Banyaknya Anggota Rumah Tangga:							
1 Orang	67,42	63,14	70,61	66,88	66,01	69,27	
2 Orang	66,99	62,11	72,03	67,07	64,87	68,86	
3 Orang	66,13	62,76	72,95	67,85	61,46	68,65	
4 Orang	67,40	63,11	73,95	68,53	63,32	69,97	
5 Orang atau Lebih	68,83	63,56	75,43	69,49	65,16	71,50	
Pendidikan Tertinggi							
Tidak pernah sekolah	63,49	56,63	70,98	63,80	61,68	64,83	
Tidak tamat SD/ sederajat	65,95	62,55	73,93	68,24	60,15	68,93	
SD sederajat	65,54	60,08	73,97	67,03	60,99	68,19	
SMP sederajat	69,72	65,12	74,03	69,57	67,18	72,20	
SMA sederajat	71,03	69,29	76,20	72,75	65,49	74,36	
Diploma I, II, III	73,48	73,83	76,22	75,02	68,37	76,59	
Diploma IV/S1	75,16	73,86	77,50	75,68	70,55	78,84	
S2, S3	76,48	76,94	73,83	75,38	73,11	80,68	
Pendapatan Rata							
Hingga Rp 1.800.000	62,39	56,29	70,23	63,26	58,03	65,50	
Rp 1.800.001 - Rp 3.000.000	67,41	61,62	73,63	67,63	65,02	69,37	
Rp 3.000.001 - Rp 4.800.000	70,56	68,19	77,31	72,75	65,30	73,13	
Rp 4.800.001 - Rp 7.200.000	74,78	74,60	78,29	76,44	70,37	77,12	
Lebih Dari Rp. 7.200.000	75,25	75,54	77,34	76,44	71,32	77,62	
Papua	67,52	63,04	73,80	73,80	68,42	69,98	

POTENSI DESA (PODES)

Data PODES 2018 mencatat, di Provinsi Papua terdapat 5.456 desa, 96 kelurahan, 576 kecamatan, dan 29 kabupaten/kota

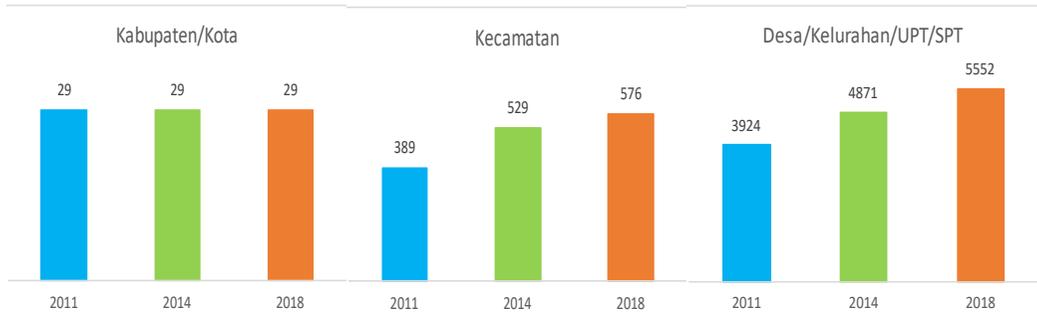
Podes 2018 dilaksanakan pada Mei 2018 secara sensus terhadap seluruh Desa/ Kelurahan/Unit Permukiman Transmigrasi (UPT)/Satuan Permukiman Transmigrasi (SPT), Kecamatan, Kabupaten/Kota. Wilayah tersebut harus memenuhi tiga (3) syarat, yaitu: 1) ada wilayah 2) ada penduduk, dan 3) ada pemerintahan desa. Menurut Podes 2018, di Provinsi Papua terdapat 5.552 wilayah setingkat desa, 576 kecamatan, 29 kabupaten/kota. Dari sejumlah desa tersebut, terdiri atas 5.456 desa dan 96 kelurahan.

Indeks Pembangunan Desa (IPD) adalah indeks komposit yang menggambarkan tingkat kemajuan atau perkembangan desa pada suatu waktu. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan, Indeks Pembangunan Desa terdiri dari lima (5) dimensi yaitu 1) Pelayanan Dasar, 2) Kondisi Infrastruktur, 3) Aksesibilitas/Transportasi, 4) Pelayanan Umum, dan 5) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Tingkat perkembangan desa menurut IPD dikategorikan kedalam tiga (3) status yaitu: Desa Mandiri, Desa Berkembang, dan Desa Tertinggal. Semakin tinggi IPD menunjukkan semakin mandiri desa tersebut. Jumlah desa mandiri di Provinsi Papua sebanyak 10 desa (0,18 persen), 693 desa berkembang (12,70 persen), dan 4.753 desa tertinggal (87,12 persen). Rata-rata IPD Provinsi Papua untuk Dimensi Transportasi 56,96; Dimensi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 52,30; Dimensi Pelayanan Umum 41,67 persen; Dimensi Pelayanan Dasar 25,05; dan Dimensi Kondisi Infrastruktur 18,49.

Pendataan Podes 2018 mengumpulkan beragam informasi. Salah satu potensi desa/kelurahan yang disajikan terkait bidang pariwisata yaitu potensi wisata di desa/kelurahan. Podes

Gambar 10. Jumlah Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan/UPT/SPT Hasil PODES Provinsi Papua Tahun 2011, 2014 dan 2018



2018 mencatat ada 40 desa wisata di Provinsi Papua, meningkat dari tahun 2014 yang hanya 17 desa wisata. Pada bidang ekonomi, peningkatan terjadi pada desa/kelurahan yang memiliki Industri Kecil dan Mikro. Peningkatan terbesar terjadi pada Industri Makanan dan Minuman sebesar 77 persen (menjadi 244 desa/kelurahan). Pada sarana ekonomi lainnya juga terjadi peningkatan dibandingkan tahun 2014. Desa/kelurahan dengan keberadaan warung/toko kelontong, pasar dengan bangunan (permanen dan semi permanen), hotel/penginapan, toko/warung kelontong.

Pada bidang kesehatan, desa dengan penyelenggaraan kegiatan posyandu sebulan sekali meningkat 18 persen dibandingkan tahun 2014 menjadi 2.012 desa/kelurahan. Desa/kelurahan dengan keberadaan puskesmas dan puskesmas pembantu masing-masing meningkat 9 persen (menjadi 422 desa/

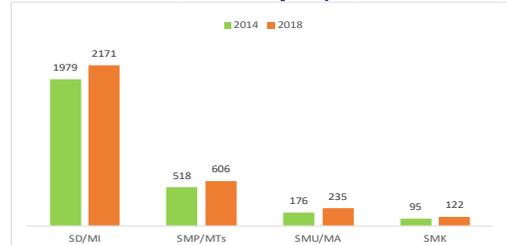
kelurahan) dan 17 persen (menjadi 1.146 desa/kelurahan). Pada bidang perumahan dan lingkungan hidup ada beberapa peningkatan dibandingkan tahun 2014. Desa dengan/kelurahan dengan keberadaan pengguna listrik meningkat 39 persen (menjadi 4.050 desa/kelurahan). Desa/kelurahan dengan keberadaan pengguna sumber air bersih untuk minum meningkat 12 persen (menjadi 3.906 desa/kelurahan). Desa/kelurahan dengan keberadaan pengguna jamban sebagai fasilitas buang air besar meningkat sebesar 44 persen (menjadi 3.020 desa/kelurahan).

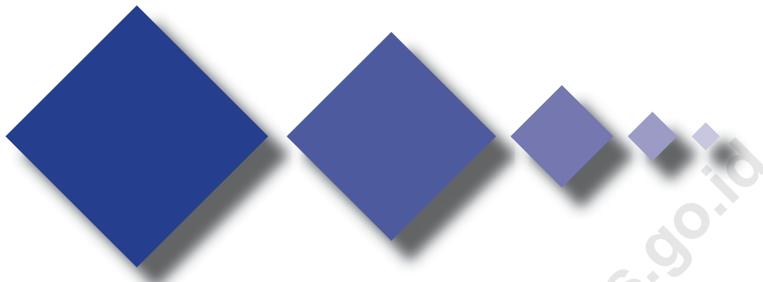
Pada bidang pendidikan, desa dengan keberadaan SD/MI sampai dengan SMU/MA dan SMK mengalami peningkatan. Peningkatan terbesar terjadi pada keberadaan SMU/MA. Dari segi pendidikan kepala desa/lurah, ada 1.817 kepala desa/lurah berpendidikan minimal SMU/ sederajat (meningkat 33 persen dibandingkan tahun 2014).

Gambar 11. Perkembangan Sarana Sektor Ekonomi Provinsi Papua, 2014 dan 2018

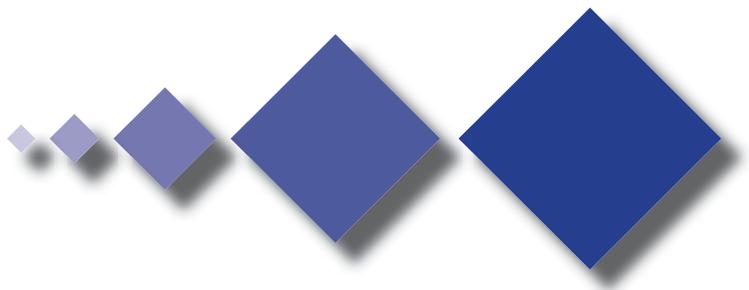


Gambar 12. Perkembangan Sarana Sektor Pendidikan Provinsi Papua, 2014 dan 2018





EKONOMI DAN PERDAGANGAN



INFLASI

Pada Agustus 2020 gabungan 3 kota IHK di Papua mengalami deflasi sebesar 0,20 persen

Pengukuran inflasi di Indonesia menggunakan IHK tahun dasar 2018=100 sejak Februari 2020. Ada beberapa perubahan mendasar dalam penghitungan IHK tahun dasar 2018=100 dibandingkan IHK 2012=100, khususnya dari sisi cakupan, klasifikasi pengelompokan komoditas, metodologi dan lainnya. Perubahan tersebut didasarkan pada Survei Biaya Hidup (SBH) 2018, dan hasilnya mencerminkan perubahan pola konsumsi masyarakat. Dari 90 kota di seluruh Indonesia, 3 diantaranya berada di Provinsi Papua meliputi: Merauke, Timika dan Kota Jayapura. Selain perubahan cakupan, IHK (2018=100) juga mengalami perubahan sisi pengelompokan komoditas yang didasarkan pada COICOP 2018 yang sebelumnya COICOP 1999.

Pada Bulan Agustus 2020 gabungan 3 kota IHK dengan menggunakan penghitungan dan tahun dasar baru tahun 2018, tercatat mengalami penurunan angka Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 105,07 pada Juli 2020 menjadi 104,86 pada Agustus 2020. Laju Inflasi gabungan 3 kota IHK di Papua tahun kalender (Agustus 2020 terhadap Desember 2019) mencapai 1,65 persen dan laju inflasi y-o-y (Agustus 2020 terhadap Agustus 2019) mencapai 1,66 persen.

Deflasi gabungan 3 kota IHK di Papua pada Agustus 2020 terjadi karena adanya penurunan indeks pada kelompok

Tabel. 4 Inflasi Bulanan, Tahun Kalender, dan Year on Year Gabungan 3 Kota IHK di Papua

No.	Inflasi	2018 ¹⁾	2019 ¹⁾	2020 ²⁾
1	Agustus (t) terhadap Juli (t)	-0,80	-0,15	-0,20
2	Agustus (t) terhadap Desember(t-1) (Tahun Kalender)	3,16	0,11	1,65
3	Agustus (t) terhadap Juli (t-1) (Year on Year)	4,55	3,21	1,66

1) Metode agregasi *constant weighting* menggunakan 2 kota IHK dan tahun dasar 2012 (2012=100)

2) Metode agregasi *dynamic weighting* menggunakan 3 kota IHK dan tahun dasar 2018 (2018=100)

makanan, minuman dan tembakau sebesar -1,59 persen; kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar -0,22 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar -0,06 persen; serta kelompok kesehatan sebesar -0,25 persen.

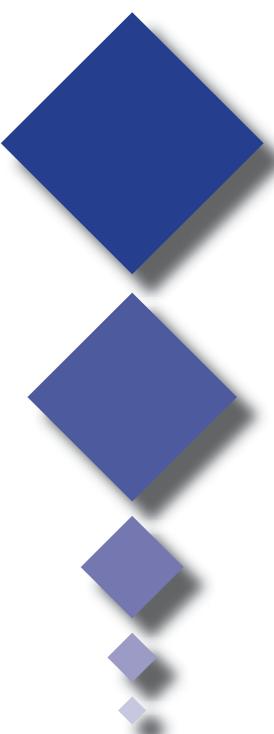
Faktor pendorong terjadinya deflasi adalah penurunan harga yang cukup signifikan pada beberapa komoditi antara lain: bawang merah, tomat, ikan cakalang, ikan ekor kuning, ikan mujair, dan lain-lain. Adapun komoditi yang memberikan andil inflasi antara lain: tarif angkutan udara, emas perhiasan, biaya pendidikan pada akademi/ perguruan tinggi, kangkung, ikan kembung dan lain-lain.

Sementara itu, besaran andil masing-masing kelompok komoditi terhadap perkembangan inflasi bulan Agustus 2020 di Papua (gabungan 3 kota IHK) yaitu: kelompok makanan,

minuman dan tembakau sebesar -0,59 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,002 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar -0,04 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar -0,003 persen; kelompok kesehatan sebesar -0,005 persen; kelompok transportasi sebesar 0,18 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,02 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,001 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,10 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/ restoran sebesar 0,01 persen; serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,13 persen.

Tabel 5. Tingkat Inflasi Menurut Kelompok Bahan Makanan (COICOP 1999) di Merauke, Timika, Kota Jayapura dan Gabungan 3 Kota IHK di Papua Agustus 2020 (2018=100)

No.	Inflasi	Merauke	Timika	Kota Jayapura	Gabungan
1	Indeks Harga Konsumen	98,57	117,84	102,42	106,57
2	Inflasi Bulanan	-3,63	0,13	-3,17	-2,14
3	Inflasi Tahun Kalender	-3,59	11,15	-0,87	2,49
4	Inflasi Year on Year	-4,74	12,67	-2,03	1,99
5	Andil terhadap Inflasi Januari 2020	-0,85	0,05	-0,80	-0,60



PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

Ekonomi Papua Triwulan-II tahun 2020 naik 4,52 persen

Perekonomian Papua pada Triwulan-II 2020 berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp48,03 triliun dan atas harga konstan mencapai Rp33,41 triliun.

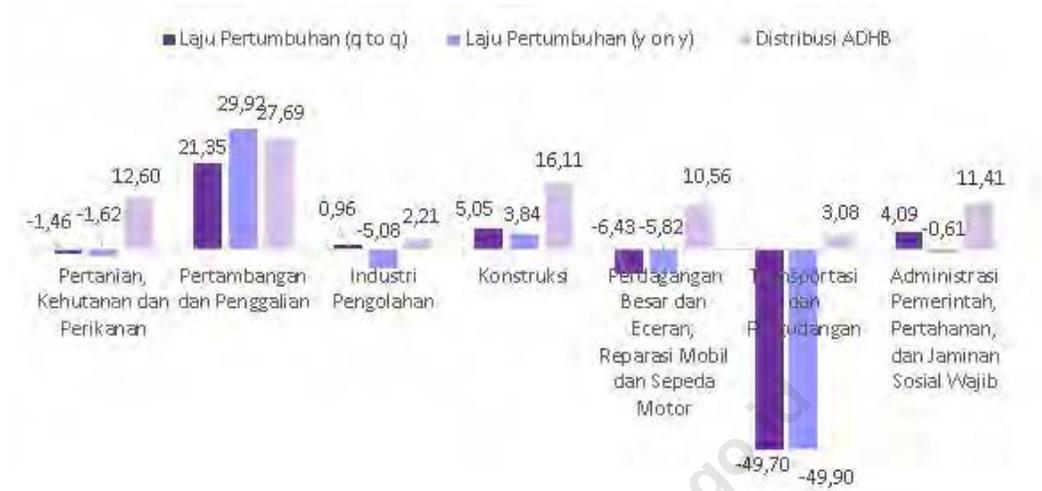
A. PDRB Menurut Lapangan Usaha

Ekonomi Papua triwulan II-2020 mengalami pertumbuhan 4,52 persen (y-on-y). Angka pertumbuhan tersebut disebabkan karena tingginya pertumbuhan Pertambangan dan Penggalian sebagai lapangan usaha yang memiliki kontribusi terbesar dalam ekonomi Papua, yang dimana adanya peningkatan produksi pada tambang bijih logam PT. Freeport Indonesia selama Triwulan-II 2020 tumbuh hingga 29,92 persen. Walaupun mengalami peningkatan dibandingkan triwulan II-2019, sebagian besar lapangan usaha cenderung mengalami kontraksi pertumbuhan, yang disebabkan adanya Covid-19 yang muncul pada akhir triwulan I-2020.

Pertumbuhan ekonomi triwulan II-2020 (q to q) mengalami pertumbuhan sebesar 3,45 persen. Ekonomi Papua tetap positif selama masa pandemi Covid-19 disebabkan karena tingginya pertumbuhan lapangan usaha yang memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB Provinsi Papua, yaitu lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian yang tumbuh sebesar 21,35 persen dimana peningkatan terjadi di produksi emas dan tembaga PT. Freeport Indonesia.

Kontraksi pertumbuhan terbesar dialami kategori Transportasi dan Pergudangan, yaitu sebesar -49,70 persen. Penurunan produksi sektor Transportasi dan Pergudangan akibat adanya penutupan bandara serta penghentian sementara transportasi laut dan udara.

Gambar 13. Laju Pertumbuhan (q to q) dan (y-on-y) serta Distribusi PDRB dengan Pertambangan dan Penggalian Beberapa Lapangan Usaha Triwulan II-2020



Nilai PDRB per kapita Papua pada triwulan II-2020 sebesar Rp 13,98 juta, mengalami kenaikan 0,40 persen jika dibandingkan triwulan lalu yang bernilai Rp 13,54 juta. Jika dilihat tanpa pertambangan dan penggalian, PDRB per kapita triwulan II-2020 sebesar Rp 10,11 juta, menunjukkan adanya penurunan dari triwulan I-2020 yang senilai Rp 10,44 juta yaitu turun sebesar -3,15 persen.

Gambar 14. Pertumbuhan Ekonomi q-to-q Provinsi Papua, Triwulan II-2016 – Triwulan II-2020



B. PDRB Menurut Pengeluaran

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Papua triwulan-II 2020 sebesar 4,52 persen (y-on-y). Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada komponen Ekspor Luar Negeri sebesar 60,35 persen yang disebabkan oleh kenaikan ekspor untuk bijih emas dan tembaga pada PT. Freeport Indonesia.

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi triwulan II-2020 (y-on-y), hanya Komponen Ekspor Luar Negeri yang memberikan sumber pertumbuhan positif, yakni sebesar 3,09 persen; sedangkan

komponen lainnya bernilai negatif.

Ekonomi Papua Triwulan II-2020 jika dibandingkan Triwulan I-2020 (q to q) mengalami pertumbuhan sebesar 3,45 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen Ekspor Luar Negeri sebesar 158,61 persen, hal ini disebabkan oleh meningkatnya Ekspor Luar Negeri untuk emas dan tembaga pada triwulan ini.

Gambar 15. Laju Pertumbuhan (q-to-q) dan (y-on-y) serta Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran Triwulan II-2020 Provinsi Papua



EKSPOR

Pada Agustus 2020, total ekspor Papua mencapai US\$196,04 juta

A. Ekspor Migas dan Non Migas

Ekspor Papua pada Agustus 2020 tercatat senilai US\$196,04 juta atau meningkat sebesar 81,65 persen dibanding bulan sebelumnya yang senilai US\$107,92 juta. Dilihat dari jenisnya, ekspor Papua bulan ini hanya berupa ekspor nonmigas senilai US\$196,04 juta. Ekspor terbesar berasal dari Pelabuhan Amamapare yaitu senilai US\$185,64 juta atau 94,7 persen dari total ekspor Papua.

Secara kumulatif, total ekspor Papua pada Januari-Agustus 2020 adalah senilai US\$712,8 juta atau meningkat sebesar 25,13 persen dibandingkan total ekspor Januari-Agustus 2019 yang senilai US\$569,63 juta.

B. Ekspor Menurut Golongan Barang HS 2 Dijit

Ekspor golongan Biji Tembaga & Konsentrat (HS26) pada Agustus 2020 senilai US\$185,64 juta. Ekspor golongan Biji Tembaga & Konsentrat (HS26) berasal dari PT. Freeport Indonesia dan dimuat di pelabuhan Amamapare di Kabupaten Mimika. Ekspor golongan Kayu & Barang dari Kayu (HS44) senilai US\$10,4 juta atau meningkat sebesar 111,44 persen dibandingkan bulan sebelumnya sebesar US\$4,92 juta. Pada bulan ini tidak terdapat ekspor golongan Ikan & Hewan Air

Tabel 6. Ringkasan Perkembangan Ekspor Provinsi Papua Januari-Agustus 2020

Uraian	Nilai FOB (Juta US\$)				% Perubahan Agus 2020* thdp Jul 2020	% Perubahan Jan-Agus 2020 thd Jan-Agus 2019	% Peran thd-Total Ekspor Jan-Agus 2020*
	Jul' 2020	Agus' 2020*	Jan-Agus 2019	Jan-Agus 2020*			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Total Ekspor	107,92	196,04	569,63	712,80	81,65	25,13	100,00
Migas	0,00	0,00	0,02	0,00	-	-97,42	0,00
Non Migas	172,92	196,04	569,61	712,80	81,65	25,14	100,00

Ket:

Tanda (*) menunjukkan Angka Sementara

Lainnya (HS03) maupun golongan Non Migas Lainnya.

Nilai kumulatif Januari-Agustus 2020 untuk ekspor golongan Bijih Tembaga & Konsentrat (HS26) sebesar US\$648,91 juta. Nilai ini meningkat sebesar 35,24 persen apabila dibandingkan dengan periode Januari-Agustus 2019 yang sebesar US\$479,83 juta. Golongan Kayu & Barang dari Kayu (HS44) memiliki nilai kumulatif Januari-Agustus 2020 sebesar US\$49,95 juta. Nilai ini menurun sebesar 23,31 persen apabila dibandingkan dengan periode Januari-Agustus 2019 yang sebesar US\$65,13 juta. Ekspor Golongan Ikan & Hewan Air Lainnya (HS03) juga mengalami penurunan sebesar 78,93 persen menjadi US\$0,02 juta pada Januari-Agustus 2020. Begitu juga dengan golongan Non Migas Lainnya mengalami penurunan 43,25 persen menjadi US\$13,92 juta.

C. Ekspor Menurut Negara Tujuan

Ekspor ke enam negara utama pada Agustus 2020 tercatat senilai US\$163,75 juta. Ekspor ke negara lainnya pada Agustus 2020 yang senilai US\$32,28 juta mengalami penurunan sebesar 20,48 persen dibanding Juli 2020 yang sebesar US\$40,6 juta. Negara lainnya yang menjadi tujuan ekspor terbesar adalah Jerman dengan nilai ekspor US\$21,89 juta, dimana komoditi yang diekspor berupa Bijih Tembaga & Konsentrat (HS26).

Secara kumulatif, ekspor Papua ke enam negara utama pada periode Januari-Agustus 2020 mengalami peningkatan sebesar 3,06 persen. Sementara ekspor Papua ke negara lainnya mengalami peningkatan sebesar 183,51 persen. Ekspor ke enam negara utama memberikan andil 72,28 persen terhadap total ekspor Papua pada Januari-Agustus 2020.

Gambar 16. Nilai Ekspor Provinsi Papua Menurut Negara Tujuan, Januari-Agustus 2019/2020* (Juta US\$)



IMPOR

Pada Agustus 2020, total impor Papua mencapai US\$10,84 juta

A. Impor Migas dan NonMigas

Impor Papua pada Agustus 2020 tercatat senilai US\$10,84 juta berupa impor nonmigas senilai US\$10,93 juta. Tidak terdapat impor migas pada bulan ini. Dibandingkan Juli 2020, nilai impor Papua mengalami penurunan sebesar 35,56 persen yang dipengaruhi oleh tidak adanya impor migas dan impor nonmigas yang mengalami penurunan sebesar 0,79 persen (turun US\$0,09 juta).

Komoditi nonmigas yang memiliki nilai impor terbesar dari golongan Barang-barang dari besi dan baja (HS73) yang memiliki nilai US\$4,2 juta atau sebesar 38,79 persen dari total nilai impor komoditi nonmigas.

B. Impor Menurut Golongan Barang HS 2 Dijit

Impor 10 golongan nonmigas utama pada Agustus 2020 tercatat senilai US\$9,4 juta atau meningkat 24,09 persen bila dibandingkan Juli 2020 yang sebesar US\$7,57 juta.

Golongan barang nonmigas utama yang mengalami peningkatan nilai impor terbesar adalah golongan Barang-barang dari besi dan baja (HS73) sebesar US\$1,39, Karet dan barang dari karet (HS40) sebesar US\$1,14 juta, dan Plastik dan barang dari plastik (HS39) sebesar US\$0,26 juta. Nilai impor golongan nonmigas lainnya mengalami penurunan sebesar

Tabel 7. Ringkasan Perkembangan Impor Provinsi Papua Januari-Agustus 2020

Uraian	Nilai CIF (Juta US\$)				% Perubahan Agus 2020* thdp Jul 2020	% Perubahan Jan-Agus 2020* thdp Jan-Agus 2019	% Peran thd Total Impor Jan-Agus 2020*
	Jul' 2020	Agus' 2020*	Jan-Agus 2019	Jan-Agus 2020*			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Total Impor	16,82	10,84	241,62	121,42	-35,56	-49,75	100,00
Migas	5,89	0,00	84,16	38,51	-100,00	-54,24	31,71
Non Migas	10,93	10,84	157,47	82,91	-0,79	-47,35	68,29

Ket:

Tanda (*) menunjukkan Angka Sementara

57,03 persen yaitu dari US\$3,35 juta menjadi US\$1,44 juta. Impor golongan nonmigas lainnya yang terbesar berasal dari golongan Sari bahan samak dan celup (HS32) senilai US\$0,65 juta.

Secara kumulatif, total nilai impor 10 golongan nonmigas utama pada periode Januari-Agustus 2020 dibandingkan tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar 48,19 persen, yaitu dari US\$129,33 juta menjadi US\$67,01 juta. Penurunan tersebut didorong oleh turunnya nilai kumulatif impor golongan Mesin-mesin/Pesawat Mekanik (HS84) sebesar US\$25,87 juta. Berbanding lurus dengan total nilai impor kumulatif golongan nonmigas lainnya yang juga turun sebesar 43,49 persen atau lebih rendah US\$12,24 juta. Impor 10 golongan nonmigas utama memberikan andil 55,19 persen terhadap total impor kumulatif Januari-Agustus 2020.

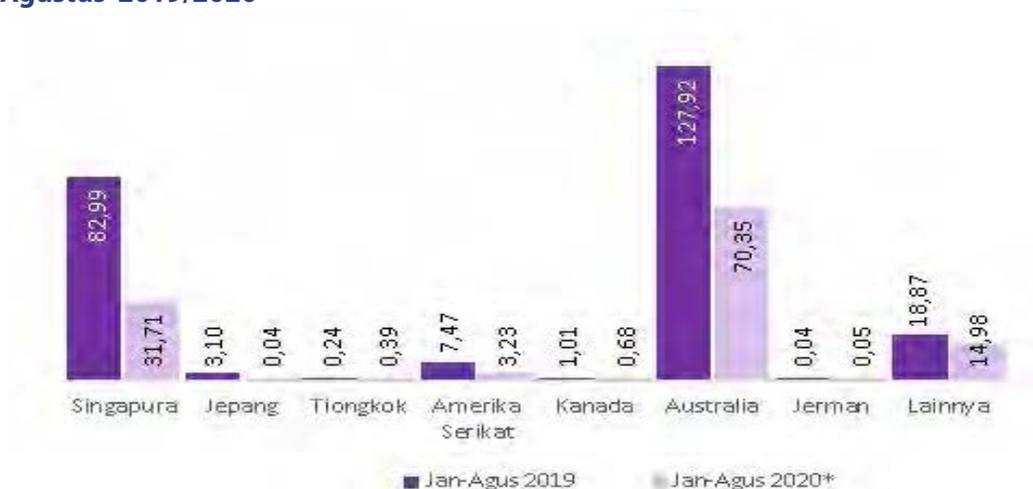
C. Impor Menurut Negara Asal

Nilai impor dari tujuh negara utama

pada Agustus 2020 tercatat sebesar US\$10,8 juta atau meningkat 24,54 persen dibandingkan nilainya pada Juli 2020 yang sebesar US\$8,67 juta. Impor dari negara lainnya mengalami penurunan senilai US\$8,15 juta. Tiga negara pemasok barang terbesar ke Papua pada Agustus 2020 adalah Australia senilai US\$9,93 juta (91,64 persen), Amerika Serikat dengan impor senilai US\$0,54 juta (4,96 persen), dan Kanada senilai US\$0,31 juta (2,89 persen).

Total nilai impor kumulatif dari tujuh negara utama pada periode Januari-Agustus 2020 adalah sebesar US\$106,44 juta atau lebih rendah 52,22 persen bila dibandingkan dengan nilainya pada Januari-Agustus 2019 yang sebesar US\$222,75 juta. Total nilai impor kumulatif dari negara lainnya pada periode Januari-Agustus 2020 mengalami penurunan sebesar 20,63 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu dari US\$18,87 juta menjadi US\$14,94 juta.

Gambar 17. Nilai Impor Provinsi Papua Menurut Negara Tujuan Januari-Agustus 2019/2020*



NILAI TUKAR PETANI

Pada bulan Agustus 2020, NTP Papua sebesar 103,13

A. Nilai Tukar Petani (NTP)

NTP yang diperoleh dari perbandingan indeks harga diterima petani (It) terhadap indeks harga dibayar petani (Ib) (dalam persentase) merupakan salah satu indikator untuk melihat kemampuan atau daya beli petani di pedesaan.

NTP menunjukkan daya tukar (*term of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif, semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani. NTP Papua Agustus 2020 tercatat naik 0,56 persen menjadi 103,13 dibandingkan NTP Juni.

Berdasarkan pemantauan harga pedesaan di beberapa daerah di Papua, kenaikan indeks NTP disebabkan oleh indeks harga yang dibayar petani (Ib) lebih kecil daripada indeks harga yang diterima petani (It).

Dilihat menurut subsektornya, perubahan angka indeks yang terjadi yaitu subsektor tanaman pangan naik 0,83 persen, hortikultura turun -1,71 persen, tanaman perkebunan rakyat naik 0,48 persen, peternakan naik 0,87 persen, dan

Gambar 18. Perkembangan NTP Papua Menurut Subsektor Juli-Agustus 2020 (2018=100)



subsektor perikanan naik 0,75 persen.

Indeks harga diterima petani (It) menggambarkan perubahan harga komoditas yang dihasilkan petani. Pada Agustus 2020, It Papua sebesar 107,82 atau naik 0,55 persen dibandingkan It Juli. Kenaikan It terjadi karena It di subsektor Tanaman Pangan naik 0,80 persen, subsektor Hortikultura turun -1,58 persen, subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat naik 0,49 persen, subsektor Peternakan naik 0,90 persen dan subsektor Perikanan naik 0,72 persen.

Fluktuasi harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat perdesaan, khususnya petani baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun untuk keperluan produksi hasil pertanian dapat diketahui melalui indeks harga dibayar petani (Ib).

Pada Agustus 2020, Ib Papua sebesar 104,54 atau turun -0,01 persen dibandingkan Ib bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 104,55. Perubahan Ib gabungan tersebut didorong oleh penurunan Ib pada subsektor, yaitu

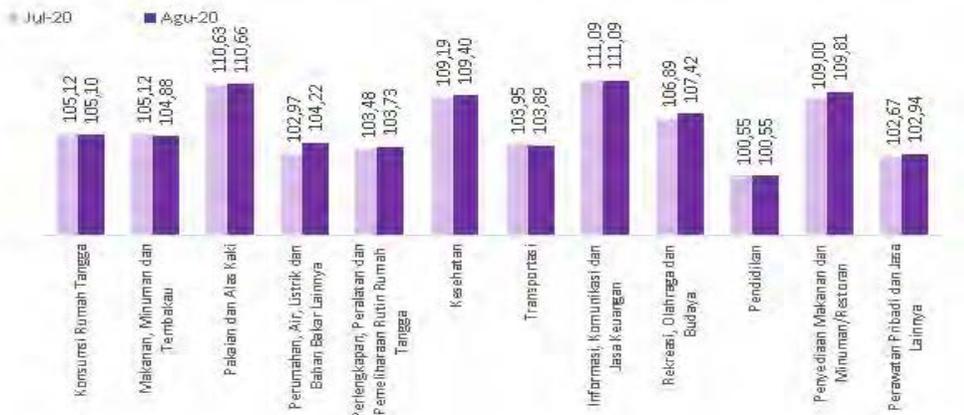
Tanaman Pangan turun sebesar -0,03 persen, subsektor Hortikultura naik 0,13 persen, subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat naik 0,01 persen, subsektor Peternakan naik 0,03 persen, dan subsektor Perikanan turun -0,04 persen.

B. Perkembangan Indeks Harga Konsumsi Perdesaan

Pada Agustus 2020, terjadi deflasi 0,02 persen di wilayah perdesaan Papua yang dipicu oleh turunnya indeks harga pada kelompok pengeluaran rumah tangga.

Dari 34 provinsi, diketahui hampir semua provinsi mengalami penurunan IKRT kecuali Provinsi NAD yang mengalami kenaikan IKRT sebesar 0,06 persen. Penurunan terbesar terjadi di Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu sebesar 0,62 persen. Adapun penurunan terkecil terjadi di Provinsi Papua yaitu sebesar -0,02 persen.

Gambar 19. Perkembangan Indeks Konsumsi Rumah Tangga Menurut Subkelompok Pengeluaran Provinsi Papua, Juli-Agustus 2020 (2018=100)



C. Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) Subsektor

NTUP Papua pada Agustus 2020 adalah 105,73 atau naik sebesar 0,50 persen. Berdasarkan subsektor, tercatat subsektor Tanaman Pangan naik 0,70 persen, subsektor Hortikultura turun -1,54 persen, subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat naik 0,71 persen, subsektor Peternakan naik 0,88 persen dan subsektor Perikanan naik 0,74 persen.

Tabel 6. Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian menurut subsektor Provinsi Papua dan Persentase Perubahannya, Juli-Agustus 2020 (2018=100)

Subsektor	JULI 2020	AGUSTUS 2020	PERUBAHAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Tanaman Pangan	104,11	104,83	0,70
2. Hortikultura	106,43	104,80	-1,54
3. Tanaman Perkebunan Rakyat	102,28	103,01	0,71
4. Peternakan	110,53	111,51	0,88
5. Perikanan	111,41	112,23	0,74
5.1 Perikanan Tangkap	111,78	112,74	0,86
5.2 Perikanan Budidaya	105,19	103,70	-1,42
NTUP Gabungan	105,20	105,73	0,50

ANGKUTAN LAUT

Jumlah penumpang berangkat (angkutan laut dalam negeri) pada Juli 2020 tercatat sebanyak 7.758 orang

A. Penumpang Berangkat dan Datang

Pandemi COVID-19 mulai menyebar di seluruh dunia pada awal tahun 2020. Provinsi Papua memberlakukan Pembatasan Sosial yang diperluas dan diperketat (PSDD) dari akhir Maret 2020 hingga Mei 2020. Selanjutnya awal Juni 2020, ditetapkan tatanan hidup baru atau biasa kita menyebutnya dengan Sistem New Normal. Pada sistem ini, angkutan udara dan angkutan laut mulai beroperasi dengan beberapa ketentuan yang berlaku. Jumlah Penumpang yang berangkat menggunakan angkutan laut dalam negeri pada Juli 2020 tercatat sebanyak 7.758 orang, dibanding Juni 2020 sebanyak 3.233 orang.

Penumpang datang dan berangkat dari Pelabuhan Jayapura masing-masing tercatat sebanyak 3.748 orang dan 7.530 orang. Sementara penumpang yang datang dan berangkat dari Pelabuhan Merauke masing-masing sebanyak 49 orang dan 228 orang.

Jumlah embarkasi kumulatif penumpang angkutan laut pada Januari-Juli 2020 menurun 40,54 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2019 yang sebanyak 89.222 orang. Sedangkan arus debarkasi penumpang pada

Tabel 7. Perkembangan Penumpang Berangkat dan Datang Angkutan Laut Dalam Negeri Pelabuhan Jayapura dan Pelabuhan Merauke, Juli 2020

Pelabuhan	Jumlah Penumpang Berangkat			Jumlah Penumpang Datang		
	Jun'20 (Orang)	Jul'20 (Orang)	% Perubahan Jun'20*thd Jul'20	Jun'20 (Orang)	Jul'20 (Orang)	% Perubahan Jun'20*thd Jul'20
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jayapura	3.233	7.530	132,91	1.240	3.748	202,26
Merauke	-	228	-	-	49	-
Total	3.233	7.758	139,96	1.240	3.797	206,21

periode Januari-Juli 2020 mengalami penurunan sebesar 57.481 orang.

B. Bongkar dan Muat Barang

Volume barang yang dimuat pada Juli 2020 tercatat sebesar 12.049 ton atau menurun 37,97 persen dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 19.423 ton.

Dilihat menurut pelabuhan, volume muat barang di Pelabuhan Jayapura, tercatat sebesar 10.049 ton atau meningkat 2,8 persen. Sedangkan di Pelabuhan Merauke, volume muat barang tercatat sebesar 2.000 ton atau menurun 79,27 persen. Volume barang yang dimuat pada Januari-Juli 2020 meningkat 66,89 persen bila dibandingkan dengan Januari-Juli 2019 sebesar 71.184 ton. Hal tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya volume barang yang dimuat di

Pelabuhan Jayapura sebesar 40,5 persen dan di Pelabuhan Merauke sebesar 168,62 persen.

Volume barang yang dibongkar pada Juli 2020 sebesar 94.369 ton. Di Pelabuhan Jayapura, volume bongkar barang pada Juli 2020 tercatat sebesar 75.661 ton atau naik 22,36 persen dibandingkan Juni 2020 yang sebesar 61.833 ton. Di Pelabuhan Merauke, volume bongkar barang tercatat sebesar 18.708 ton atau turun 20,66 persen. Volume bongkar barang di Pelabuhan Jayapura dan Pelabuhan Merauke pada Januari-Juli 2020 menurun 3,78 persen bila dibandingkan Januari-Juli 2019 yang sebesar 775.407 ton.

Tabel 8. Perkembangan Bongkar dan Muat Barang Angkutan Laut Dalam Negeri Pelabuhan Jayapura dan Pelabuhan Merauke, Juli 2020

Pelabuhan	Volume Bongkar Barang			Volume Muat Barang		
	Jun'20 (Ton)	Jul'20 (Ton)	% Perubahan Juli'20*thd Jun'20	Jun'20 (Ton)	Jul'20 (Ton)	% Perubahan Jul'20*thd Jun'20
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jayapura	61.833	75.661	22,36	9.775	10.049	2,80
Merauke	23.581	18.708	-20,66	9.648	2.000	-79,27
Total	85.414	94.369	10,48	19.423	12.409	-37,97

INDUSTRI MANUFAKTUR

Pertumbuhan produksi industri manufaktur besar dan sedang di triwulan IV-2019 tumbuh negatif 24,60 persen

A. Industri Manufaktur Besar Dan Sedang Triwulan IV-Tahun 2019

Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang (q-to-q) pada Triwulan IV-2019 mengalami pertumbuhan negatif sebesar 24,60 persen dari Triwulan III-2019. Angka pertumbuhan tersebut lebih rendah dari angka pertumbuhan secara nasional yang tumbuh positif sebesar 0,09 persen. Penurunan angka pertumbuhan ini disebabkan karena terjadi penurunan produksi pada Industri Kayu, Barang dari Kayu (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya (KBLI 16). Produksi kayu mengalami penurunan drastis karena vakumnya salah satu perusahaan kayu dengan skala besar di Papua sehingga mempengaruhi jumlah kayu yang dihasilkan. Selain itu, terkait pembatasan izin untuk memperluas lahan HPH (Hak Pengusahaan Hutan) juga belum menemukan titik terang hingga saat ini. Kondisi yang sama terjadi pada produksi Industri Minuman (KBLI 11). Hal ini merupakan efek lanjutan dari kerusuhan yang terjadi di Papua pada triwulan lalu. Selain itu banyak acara-acara akhir tahun yang tidak dilaksanakan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, mengingat kondisi di beberapa tempat belum kondusif sepenuhnya,

Gambar 20. Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang Menurut KBLI Provinsi Papua Triwulan IV-2019 (persen)



Catatan:

Dari beberapa jenis IBS yang ada di Papua, hanya Industri Makanan (KBLI 10) dan Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (tidak termasuk furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan sejenisnya (KBLI 16) saja yang dapat dipublikasikan. Hal ini disebabkan karena tidak semua jenis industri manufaktur besar dan sedang memenuhi syarat penghitungan pertumbuhan produksi industri, karena jumlah perusahaannya yang sangat sedikit.

yang secara tidak langsung menyebabkan permintaan juga ikut menurun.

Jika dibandingkan dengan pertumbuhan produksi Triwulan IV-2018 pertumbuhan Produksi IBS (y-on-y) Provinsi Papua selama Triwulan IV-2019 mengalami pertumbuhan negatif sebesar 32,09 persen. Hal itu dikarenakan Industri Kayu, Barang dari Kayu (tidak termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya (KBLI 16) mengalami penurunan secara (y-on-y) pada triwulan IV-2019.

B. Industri Manufaktur Mikro Dan Kecil (IMK) Triwulan IV-2019

Pertumbuhan produksi Industri Mikro dan Kecil di Papua pada

Triwulan IV-2019 secara (q-to-q) tumbuh sebesar 1,36 persen dari Triwulan III-2019 dan berada di atas pertumbuhan nasional yang tumbuh negatif sebesar 0,24 persen.

Pertumbuhan positif tersebut dipengaruhi karena adanya perayaan Hari Raya Natal. Produksi barang galian bukan logam (KBLI 23), makanan (KBLI 10) dan minuman (KBLI 11) dengan share yang cukup besar mengalami pertumbuhan positif yaitu 3,68 persen, 0,94 persen dan 5,20 persen dari Triwulan III-2019.

Secara y-o-y, produksi Industri Mikro dan Kecil di Papua pada Triwulan IV-2019 ini mengalami pertumbuhan positif 10,53 persen dibandingkan Triwulan IV-2018.

Tabel 9. Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Mikro dan Kecil Menurut KBLI Provinsi Papua Triwulan IV-2019 (persen)

Kode KBLI	Jenis Industri	Pertumbuhan (%)	
		q to q	y-on-y
(1)	(2)	(3)	(4)
10	Industri Makanan	0,94	7,28
11	Industri Minuman	5,20	3,88
13	Industri Tekstil	2,06	-7,33
14	Industri Pakaian Jadi	14,42	1,47
15	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	22,58	5,63
16	Industri Kayu, Barang dari Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (tidak termasuk furniture) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	-6,04	-5,74
18	Industri Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	13,25	-22,19
20	Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia	-17,13	35,09
21	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	-19,26	-32,98
23	Industri Barang Galian Bukan Logam	3,68	5,82
25	Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	1,50	4,94
30	Industri Alat Angkutan Lainnya	-55,40	25,98
31	Industri Furnitur	-1,37	-14,34
32	Industri Pengolahan Lainnya	61,21	33,34
33**	Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	-41,42	97,55

catatan:
**) Angka hanya diwakili oleh satu sampel usaha/perusahaan dengan beberapa komoditi

INDEKS TENDENSI KONSUMEN

Kondisi ekonomi konsumen di Triwulan IV-2019 sebesar 114,32

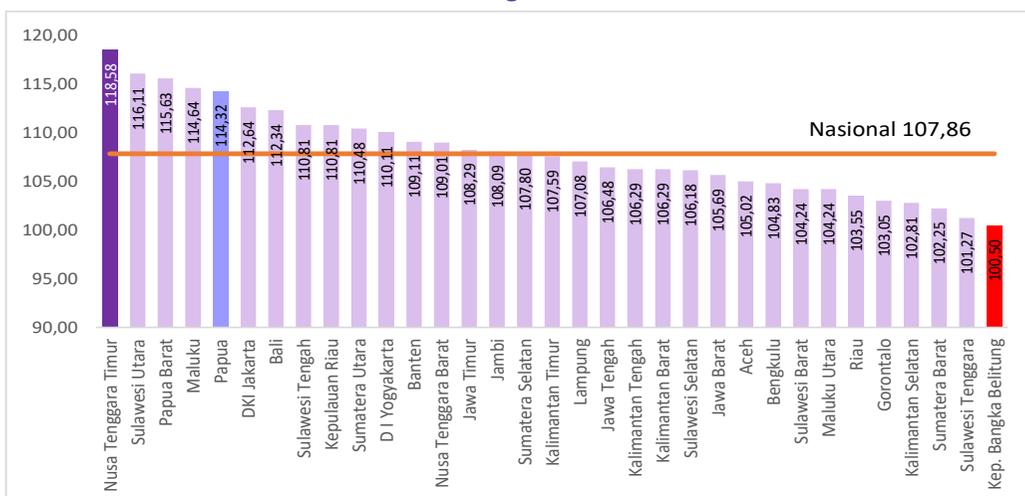
A. Indeks Tendensi Konsumen Triwulan IV Tahun 2019

Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Provinsi Papua di triwulan IV-2019 (Oktober-Desember 2019) sebesar 114,32. Angka ITK yang berada di atas 100 mengindikasikan bahwa kondisi ekonomi konsumen meningkat dibandingkan kondisinya di triwulan III-2019 (Juli-September 2019) dengan nilai ITK Triwulan III-2019 sebesar 100,08.

Indikasi membaiknya kondisi ekonomi konsumen Papua di triwulan ini disebabkan oleh meningkatnya seluruh variabel pembentuk komponen ITK. Variabel tersebut adalah pendapatan rumah tangga sebesar 119,18, pengaruh inflasi terhadap total konsumsi rumah tangga sebesar 105,53 dan volume konsumsi barang/jasa sebesar 113,89. Peningkatan tersebut dipicu adanya perayaan Hari Raya Natal dan Tahun Baru.

Di tingkat nasional, kondisi ekonomi konsumen di triwulan IV-2019 juga mengalami peningkatan dibandingkan kondisi di triwulan sebelumnya dengan indeks sebesar 107,86.

Gambar 21. ITK Triwulan IV Tahun 2019 Tingkat Nasional dan Provinsi



Naiknya kondisi ekonomi konsumen di tingkat nasional karena membaiknya kondisi ekonomi konsumen pada sebagian provinsi di Indonesia. Provinsi Kepulauan Nusa Tenggara Timur tercatat memiliki ITK tertinggi yaitu sebesar 118,58. Sedangkan ITK terendah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan nilai indeks 100,50.

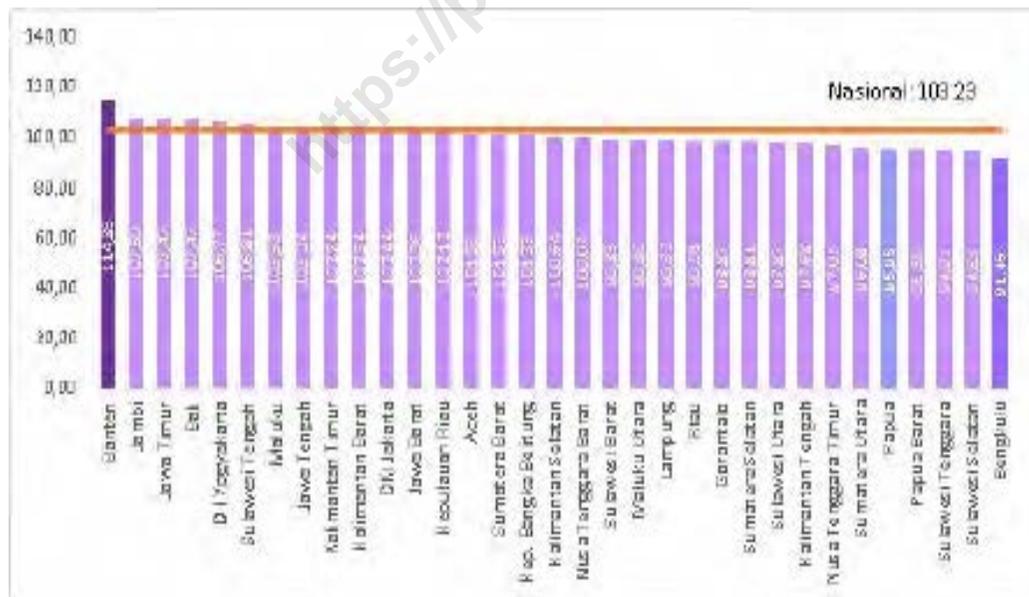
B. Perkiraan Indeks Tendensi Konsumen Triwulan I Tahun 2020

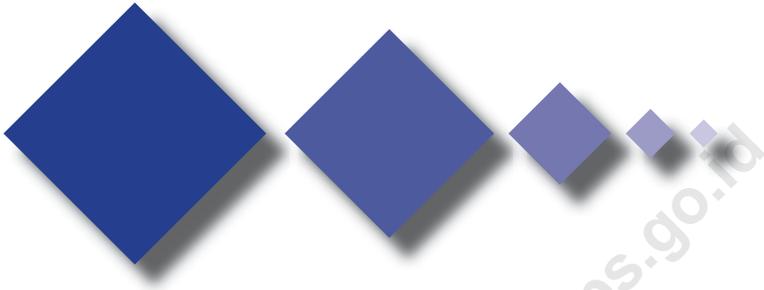
Perkiraan ITK triwulan I-2020 Provinsi Papua diperkirakan sebesar 95,95 yang berarti kondisi ekonomi konsumen diperkirakan akan menurun dibandingkan triwulan IV-2019. Penurunan diperkirakan

karena menurunnya rencana Pembelian Barang Tahan Lama, Rekreasi, dan Pesta/Hajatan dengan nilai indeks 80,47, sedangkan Indeks Pendapatan Mendatang justru meningkat dengan nilai indeks 104,79.

Di Triwulan I-2020, ITK nasional diperkirakan sebesar 103,23. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kondisi ekonomi konsumen di triwulan I-2020 diperkirakan juga meningkat dengan tingkat optimisme yang lebih rendah dibandingkan pada triwulan IV-2019. Perkiraan ITK tertinggi terjadi di Provinsi Banten yang mencapai 114,85, sementara perkiraan ITK terendah terjadi di Provinsi Bengkulu sebesar 91,45.

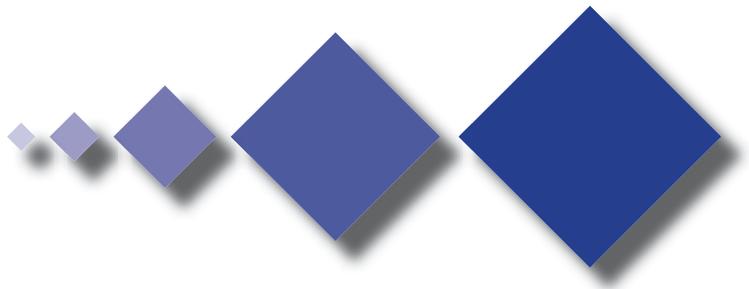
Gambar 22. Perkiraan ITK Triwulan I Tahun 2020 Tingkat Nasional dan Provinsi





PERTANIAN

<https://papua.bps.go.id>



TANAMAN PANGAN

Produksi Padi tahun 2019 Provinsi Papua mencapai 235.340 ton gabah kering giling

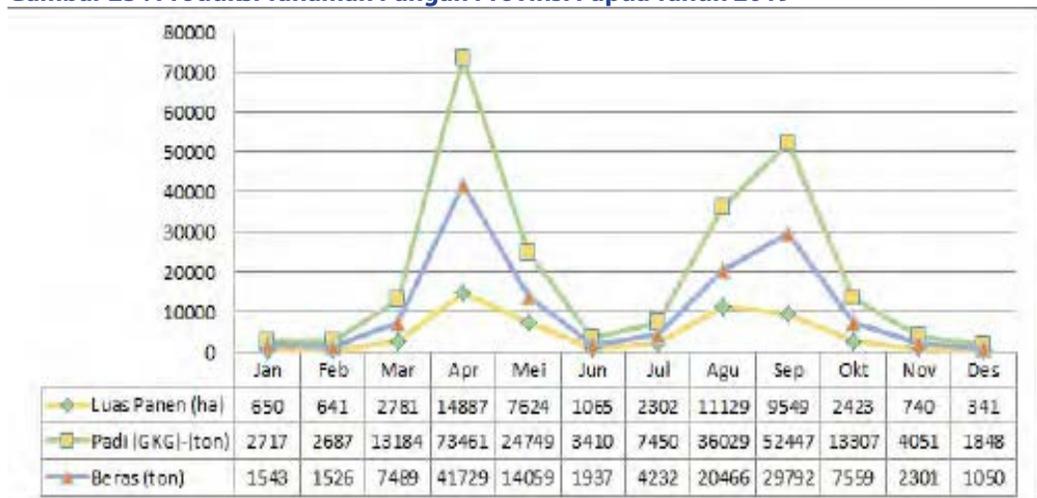
Penghitungan angka produksi Padi tahun 2019 dilakukan dengan Metode Kerangka Sampel Area (KSA). Dengan Metode tersebut dapat dihitung luas panen, dan potensi luas panen.

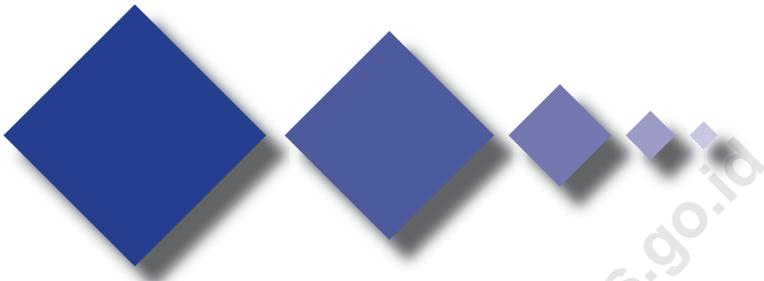
Berdasarkan hasil survei KSA, total luas panen padi di Provinsi Papua pada 2019 seluas 54.132 hektar dengan luas panen tertinggi terjadi pada April yaitu sebesar 14.887 hektar dan luas panen terendah terjadi pada Desember, yaitu sebesar 341 hektar.

Produksi Padi Provinsi Papua tahun 2019 mencapai 235.340 ton gabah kering giling (GKG), atau mengalami peningkatan sebanyak 5,48 persen dibandingkan tahun 2018. Produksi tertinggi pada 2019 terjadi pada bulan April yaitu 73.461 dan yang terendah terjadi pada bulan Desember sebesar 1.848 ton.

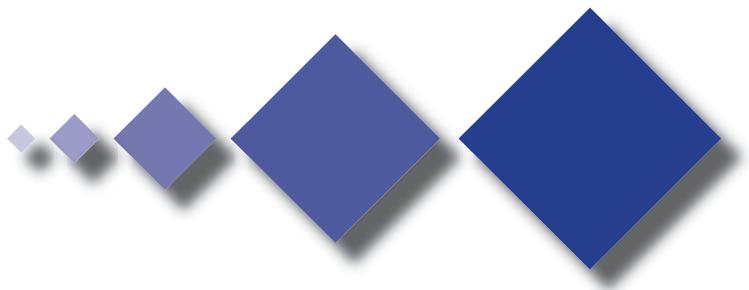
Jika produksi padi dikonversikan menjadi beras untuk konsumsi pangan penduduk, produksi padi pada 2018 setara dengan 126.742 ton beras. Sementara itu, produksi pada 2019 sebesar 133.684 ton beras atau mengalami peningkatan sebesar 5,48 persen dari produksi tahun 2018.

Gambar 23 . Produksi Tanaman Pangan Provinsi Papua Tahun 2019





INFORMASI LAINNYA



INFORMASI LAINNYA

A. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)

IKK merupakan indeks spasial yang menggambarkan perbandingan tingkat kemahalan konstruksi suatu kabupaten/kota dibandingkan kota acuan, dimana Kota Semarang sebagai kota acuan.

IKK Provinsi Papua pada tahun 2019 merupakan IKK tertinggi di Indonesia dengan nilai IKK sebesar 218,59. Sementara IKK tertinggi di Provinsi Papua adalah Kabupaten Puncak yaitu sebesar 493,31. Angka tersebut menggambarkan Kabupaten Puncak memiliki kondisi geografis yang paling sulit diantara kabupaten/kota lain di Provinsi Papua, sedangkan IKK terendah adalah Kota Jayapura dengan nilai IKK sebesar 121,49.

B. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

Aspek demokrasi yang dihitung dalam penyusunan IDI adalah Kebebasan Sipil (Civil Liberties), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga-lembaga Demokrasi (Institution of Democracy).

IDI Provinsi Papua tahun 2019 adalah 65,25 meningkat tinggi 3,05 poin dibandingkan tahun 2018. Kondisi ini menempatkan kinerja demokrasi Papua masih berada pada kategori 'sedang'.

IDI dari 2018–2019 dipengaruhi oleh penurunan aspek Kebebasan Sipil sebesar 8,72 poin (dari 84,36 menjadi 93,08), peningkatan aspek Hak-hak Politik sebesar 3,26 poin (dari 47,90 menjadi 51,16) dan dan penurunan aspek Lembaga Demokrasi sebesar 4,44 poin (dari 57,05 menjadi 52,61).

C. Gini Ratio

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Gini Ratio. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0 hingga 1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi.

Secara umum, *Gini Ratio* di Papua selama periode 2010-Maret 2012 terus mengalami fluktuasi dan pada September 2012 hingga 2013 nilainya mengalami kenaikan. Kemudian pada September 2013 hingga Maret 2014 terus mengalami penurunan, namun pada September 2014 mengalami kenaikan dan mencapai angka tertinggi.

Maret 2015 hingga 2016, *Gini Ratio* mengalami penurunan dan pada periode September 2016 hingga Maret 2019 terus berfluktuasi secara tidak signifikan, dan mencapai angka 0,392 pada Maret 2020.

D. Indeks Harga Konsumen (IHK)

Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi yang sering digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga (inflasi/deflasi) di tingkat konsumen.

Mulai Februari 2020, pengukuran inflasi di Indonesia menggunakan IHK tahun dasar 2018=100. Ada beberapa perubahan mendasar dalam penghitungan IHK tahun dasar 2018=100 dibandingkan IHK 2012=100, khususnya dari sisi cakupan, klasifikasi pengelompokan komoditas, metodologi penghitungan IHK, paket komoditas, dan diagram timbang. Perubahan tersebut didasarkan pada Survei Biaya Hidup (SBH) 2018 yang dilaksanakan oleh BPS Kota IHK di seluruh Indonesia, sebagai salah satu bahan dasar utama dalam penghitungan IHK. Hasil SBH 2018 mencerminkan perubahan pola konsumsi masyarakat yang terjadi di Indonesia.

SBH 2018 dilaksanakan di 90 kota, yang terdiri dari 34 ibu kota provinsi dan 56 kabupaten/kota. Dari 90 kota tersebut, 3 diantaranya berada di Provinsi Papua yang meliputi: Merauke, Timika, dan Kota Jayapura. Survei ini dilaksanakan di daerah perkotaan dengan mencatat seluruh pengeluaran rumah tangga setiap bulannya.

Selain perubahan cakupan, IHK (2018=100) juga mengalami perubahan dari sisi pengelompokan komoditas. Pengelompokan komoditas didasarkan pada Classification of Individual Consumption According to Purpose (COICOP) 2018 dari sebelumnya menggunakan COICOP 1999. Klasifikasi COICOP 2018 yang digunakan dimodifikasi dari 13 divisi COICOP menjadi 11 kelompok IHK. Secara nasional pengelompokan komoditas terdiri dari 11 kelompok dan 43 subkelompok.

Metode penghitungan IHK gabungan 3 kota di Papua pada 2018=100 menggunakan agregasi nilai konsumsi total seluruh kota. Adapun penghitungan rata-rata pada level komoditas menggunakan metode geometrik.

E. Nilai Tukar Petani (NTP)

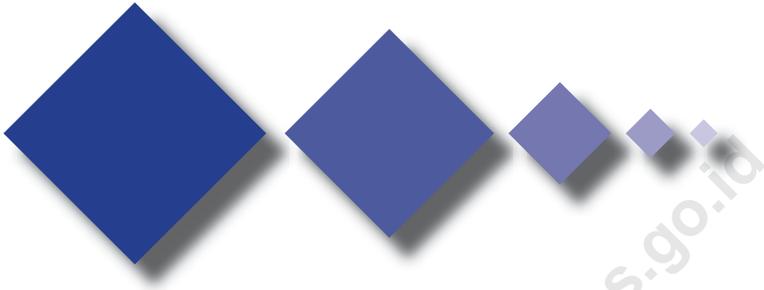
Mulai Januari 2020, penghitungan NTP menggunakan indeks harga dengan tahun



dasar baru yakni 2018=100 baik untuk lt maupun lb. Ada beberapa perubahan mendasar dalam penghitungan indeks harga 2018=100 dibandingkan dengan indeks harga 2012=100, khususnya mengenai paket komoditas maupun diagram timbang pada masing-masing subsektor yakni Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura, Tanaman Perkebunan Rakyat, Peternakan dan Perikanan. Pada Subsektor Perikanan, diagram timbang dibangun dari kegiatan Penangkapan Ikan maupun Kegiatan Budidaya Ikan.

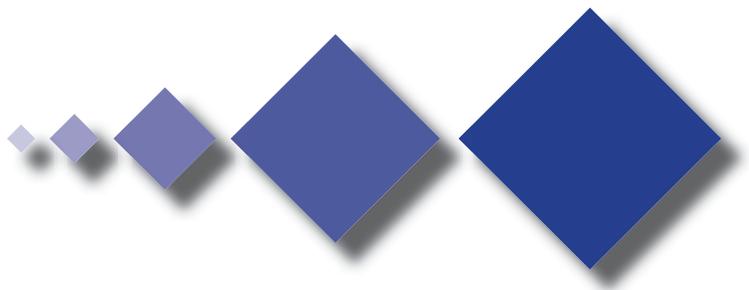
Perubahan paket komoditas dan diagram timbang dalam penghitungan NTP dengan indeks harga 2018=100 didasarkan pada hasil Survei Penyempurnaan Diagram Timbang Nilai Tukar Petani 2017 (SPDT-NTP 2017) yang dilaksanakan oleh BPS. Hasil SPDT-NTP 2017 ini sekaligus mencerminkan adanya perubahan pola produksi, pola biaya produksi dan pola konsumsi rumah tangga petani dibandingkan dengan hasil SPDT-NTP periode sebelumnya yang dilaksanakan pada tahun 2012. Secara nasional, penghitungan NTP dengan tahun dasar baru mencakup 34 provinsi sedangkan pada tahun dasar sebelumnya mencakup 33 provinsi.

Perubahan mendasar lainnya terjadi pada pengklasifikasian pengeluaran konsumsi rumah tangga yang merupakan salah satu komponen nilai yang dibayar oleh rumah tangga petani. Perkembangan harga konsumsi rumah tangga yang meliputi berbagai barang dan jasa dari waktu ke waktu tercermin melalui Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT). IKRT yang dihitung dengan tahun dasar baru 2018=100 menggunakan klasifikasi pengeluaran konsumsi rumah tangga berdasarkan modifikasi *Classification of Individual Consumption According to Purpose* 2018 (COICOP 2018). COICOP 2018 merupakan referensi internasional untuk klasifikasi pengeluaran rumah tangga. Pengklasifikasian pengeluaran konsumsi rumah tangga dengan COICOP 2018 terdiri dari 11 (sebelas) Kelompok Pengeluaran. Sementara itu, pada tahun dasar sebelumnya yakni 2012=100, pengklasifikasian rumah tangga didasarkan pada 7 (tujuh) Kelompok Pengeluaran berdasarkan modifikasi COICOP 1999.



LAMPIRAN

<https://www.bps.go.id>



PENJELASAN TEKNIS

- ◆ Penghitungan PDRB atas dasar harga konstan yang sebelumnya menggunakan tahun dasar 2000, sejak 2015 menggunakan tahun dasar 2010 berbasis SNA. Penghitungan PDRB dengan tahun dasar baru tersebut telah dihitung mundur sampai dengan tahun 2010.
- ◆ PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun untuk melihat pergeseran ekonomi.
- ◆ Penghitungan Indeks Harga Konsumen sebelumnya menggunakan IHK tahun 2012=100, sejak Februari 2020 menggunakan IHK tahun 2018=100. Perubahan tersebut didasarkan pada Survei Biaya Hidup (SBH) 2018 yang dilaksanakan BPS Kota IHK di seluruh Indonesia. SBH 2018 dilaksanakan di 90 kota di seluruh Indonesia, dan 3 diantaranya berada di Papua yang diwakili oleh Kota Jayapura, Kabupaten Merauke dan Kabupaten Timika. Selain perubahan cakupan, IHK (2018=100) juga mengalami perubahan dari sisi pengelompokan komoditas yang didasarkan pada *Classification of Individual Consumption According to Purpose* (COICOP) 2018 dari sebelumnya menggunakan COICOP 1999.
- ◆ Penduduk Usia Kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun lebih.
- ◆ Pekerja adalah seseorang yang melakukan kegiatan ekonomi dengan maksud memperoleh pendapatan atau membantu memperoleh pendapatan/keuntungan paling sedikit satu jam tidak terputus dalam seminggu lalu, kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tidak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.
- ◆ Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif terlihat secara ekonomi di suatu negara atau wilayah. TPAK diukur sebagai persentase angkatan kerja (pekerja dan pengangguran) terhadap jumlah penduduk usia kerja.
- ◆ Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengindikasikan tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. TPT diukur sebagai persentase pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.
- ◆ Penghitungan NTP baik It maupun Ib menggunakan indeks harga dengan tahun dasar baru yakni 2018=100 dari sebelumnya 2012=100. Penghitungan NTP melalui Survei Penyempurnaan Diagram Timbang Nilai Tukar Petani 2017 (SPDT-NTP 2017) memiliki perubahan, dimana secara nasional penghitungan NTP yang mencakup 33 provinsi menjadi 34 provinsi di tahun dasar baru. Selain itu perubahan mendasar lainnya yaitu Indeks Konsumsi Rumah Tangga

Indikator Makro Provinsi Papua Tahun 2016 - 2020

Jenis Indikator		2016	2017	2018	2019	2020
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Indikator Sosial						
Keperluan penduduk dan kesejahteraan	Jumlah penduduk (Jiwa)	3.207.444	3.265.444	3.322.526	3.379.302	N/A
	IPM	58,05	59,09	60,06	60,84	N/A
	1. AHH saat lahir (tahun)	65,12	65,14	65,36	65,65	N/A
	2. Harapan lama sekolah (tahun)	10,23	10,54	10,83	11,05	N/A
	3. Rata-rata lama sekolah (tahun)	6,15	6,27	6,52	6,65	N/A
	4. Pengeluaran perkapita disesuaikan (ribu Rp)	6.637	6.996	7.159	7.336	N/A
	Angkatan kerja (Jiwa)	1.743.160	1.753.858	1.851.486	1.808.848	1.830.409 ¹⁾
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	78,77	77,3	79,38	76,04	75,23 ¹⁾
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,97	3,96	3,20	3,42	3,62 ¹⁾
	Persentase penduduk miskin (persen)	28,54	27,62	27,43	27,53	26,64 ¹⁾
	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	427.176	457.541	499.643	557.236	562.992 ¹⁾
	Distribusi pendapatan					
	40 % berpendapatan rendah	14,36	14,71	15,55	15,74	15,62 ¹⁾
	40 % berpendapatan sedang	42,38	41,13	41,03	39,34	39,73 ¹⁾
	20 % berpendapatan tinggi	43,26	44,16	43,42	44,92	44,66 ¹⁾
Gini Ratio	0,397	0,398	0,398	0,391	0,392 ¹⁾	
Indikator Ekonomi						
Pembangunan Ekonomi	Ekspor-Import					
	Ekspor (Juta US\$)	2.004,04	2.454,59	3.856,46	1.209,74	-
	Januari-Agustus 2020					712,8
	Import (Juta US\$)	1.907,96	446,51	521,87	355,33	-
	Januari-Agustus 2020					121,42
	Neraca Perdagangan (Juta US\$)	96,08	2.008,08	3.334,5	854,41	-
	Januari-Agustus 2020					591,38
	Inflasi					
	Inflasi Kota Jayapura	4,13	2,41	6,70	0,66	-0,32 ¹⁾
	Inflasi Kabupaten Merauke	0,82	1,25	5,42	0,86	-0,64 ¹⁾
	Inflasi Kabupaten Timika	-	-	-	-	0,41 ¹⁾
	Pertumbuhan Ekonomi (persen)					
	Dengan Tambang (Persen)	9,21	4,64	7,33	-15,72	4,52 ¹⁾
	Tanpa Tambang (Persen)	6,52	5,18	5,04	5,03	-4,50 ¹⁾
	PORB Berliku					
Dengan Tambang (miliar Rp)	173.208,86	188.945,17	210.659,81	189.716,40	48.029,56 ¹⁾	
Tanpa Tambang (miliar Rp)	114.183,51	122.464,78	133.313,76	144.899,56	34.729,96 ¹⁾	
PORB Harga Konstan						
Dengan Tambang (miliar Rp)	142.224,93	148.822,52	159.728,93	134.677,64	33.407,14 ¹⁾	
Tanpa Tambang (miliar Rp)	82.384,56	86.648,46	91.016,63	95.657,38	22.525,94 ¹⁾	

¹⁾ Keadaan Agustus 2019

²⁾ Keadaan Maret 2020

³⁾ Keadaan September 2020

⁴⁾ Keadaan Agustus 2020

N/A : Not Available (data belum tersedia)

Indikator Strategis Provinsi Papua Tahun 2020

Jenis Indikator	Satuan	2020								
		Jan' (3)	Feb' (4)	Mar' (5)	Apr' (6)	Mei (7)	Jun' (8)	Jul' (9)	Agus' (10)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
Ekonomi										
Ekspor	Juta US\$	7,99	8,63	84,36	41,02	74,48	192,36	107,92	196,04	
Impor	Juta US\$	18,26	18,45	12,82	13,6	12,79	17,35	16,82	10,84	
Neraca Perdagangan	Juta US\$	10,26	9,82	71,54	27,42	61,69	175,01	91,1	185,2	
Inflasi										
Inflasi Gabungan	Persen	0.42	0.39	0.92	0.43	0.31	0.35	0.64	0.20	
Inflasi Kota Jayapura	Persen	0.17	0.4	-0.29	0.3	-0.07	0.15	0.62	-0.32	
Inflasi Kabupaten Merauke	Persen	0.42	0.93	1.33	0.56	0.70	0.2	-0.48	-0.64	
Inflasi Kabupaten Timika	Persen	1.00	0.81	-1.91	0.72	0.90	0.92	1.45	0.41	
Pertumbuhan Ekonomi										
Dengan Tambang	Persen	-	-13.72	-	-	1.48	-	-	4.32	
Tanpa Tambang	Persen	-	3.03	-	-	3.03	-	-	-4.30	
PDRB ADHB										
Dengan Tambang	Miliar Rp	-	189.716,40	-	-	32.292,64	-	-	33.407,14	
Tanpa Tambang	Miliar Rp	-	144.899,56	-	-	23.323,99	-	-	22.523,94	
Industri Manufaktur Besar dan Sedang										
Industri Manufaktur Besar dan Sedang	Persen	-	-2.46	-	-	-	-	-	-	
Industri Manufaktur Mikro dan Kecil										
Industri Manufaktur Mikro dan Kecil	Persen	-	1.36	-	-	-	-	-	-	

<https://papua.bps.go.id>

Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota se-Papua Tahun 2015-2019¹⁾

No.	Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Merauke	216.585	220.006	223.389	225.714	227.411
2	Jayawijaya	206.320	210.229	212.811	214.994	217.887
3	Jayapura	121.410	123.780	125.975	128.587	131.802
4	Nabire	140.178	142.795	145.101	147.921	150.308
5	Kepulauan Yapen	91.404	93.114	95.007	97.412	101.204
6	Biak Numfor	139.171	141.801	144.697	148.404	152.401
7	Paniai	164.280	167.325	170.193	173.392	177.410
8	Puncak Jaya	115.310	119.779	123.591	126.113	129.300
9	Mimika	201.677	205.591	210.413	215.493	219.689
10	Boven Digoel	63.020	64.674	66.209	67.717	69.211
11	Miappi	91.876	93.592	94.671	95.599	103.292
12	Asmat	88.578	90.316	92.909	95.606	97.490
13	Yahukimo	181.326	184.217	187.021	189.092	190.887
14	Pegunungan Bintang	71.710	72.511	73.473	74.396	75.788
15	Tolikara	131.323	133.786	136.576	137.695	139.111
16	Sarmi	36.797	37.511	38.210	39.406	40.515
17	Keerom	53.694	54.130	55.018	55.799	57.100
18	Waropen	28.395	28.803	29.480	30.612	31.514
19	Supiori	18.186	18.486	19.104	20.018	20.710
20	Memberamo Raya	21.523	21.821	22.313	23.307	24.086
21	Meluga	94.173	95.885	97.012	97.517	98.595
22	Lanny Jaya	172.625	174.782	176.687	177.682	178.995
23	Mamberamo Tengah	46.321	46.626	47.487	48.090	48.201
24	Yalimo	58.891	59.778	60.822	61.115	62.605
25	Puncak	103.624	105.521	107.822	111.182	113.204
26	Dogiyai	92.190	93.809	94.997	96.590	97.902
27	Intan Jaya	45.917	47.300	48.318	48.812	49.292
28	Deiyai	69.381	70.620	72.206	72.486	73.199
29	Kota Jayapura	283.490	288.786	293.630	297.775	300.192
	Provinsi Papua	3.091.047	3.149.375	3.207.444	3.265.202	3.379.302

2019¹⁾ angka hasil proyeksi penduduk

**Nilai Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten/Kota se-Papua
Tahun 2015-2019**

No.	Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Merauke	195,66	179,69	168,31	156,56	153,05
2	Jayawijaya	269,20	282,04	290,37	311,96	304,65
3	Jayapura	131,25	128,93	137,54	125,98	123,98
4	Nabire	148,86	152,00	147,53	150,45	148,12
5	Kepulauan Yapen	145,03	144,48	144,96	142,25	149,24
6	Biak Numfor	167,96	153,00	142,21	134,88	132,35
7	Paniai	227,34	215,29	225,31	250,29	241,21
8	Puncak Jaya	409,55	423,41	436,94	464,12	459,89
9	Mimika	173,41	156,16	148,00	150,54	133,19
10	Boven Digoel	196,67	181,24	171,29	161,96	162,63
11	Mappi	204,81	190,36	180,53	167,70	152,24
12	Asmat	207,30	220,75	231,32	213,94	202,28
13	Yahukimo	216,76	229,55	242,78	220,02	205,60
14	Pegunungan Bintang	367,19	379,97	391,44	368,02	364,25
15	Tolikara	366,04	351,04	351,23	377,27	360,48
16	Sarmi	219,74	200,31	188,91	163,77	145,09
17	Keerom	170,34	157,21	160,94	147,62	141,98
18	Waropen	166,40	154,47	163,01	186,5	171,32
19	Soproni	176,18	160,77	150,79	149,02	138,44
20	Memberamo Raya	194,18	182,07	192,76	208,29	193,19
21	Nduga	342,18	326,15	318,34	325,36	307,41
22	Lanny Jaya	337,46	325,43	332,92	337,65	333,55
23	Mamberamo Tengah	379,92	392,84	409,74	429,33	422,66
24	Yalimo	369,21	352,28	343,90	370,50	362,18
25	Puncak	449,72	454,67	469,96	498,98	493,31
26	Dogiyai	220,72	204,28	209,49	236,53	224,53
27	Intan Jaya	424,02	397,57	412,52	441,38	439,11
28	Deiyai	221,29	218,81	229,29	253,83	238,89
29	Kota Jayapura	158,69	150,07	147,06	132,86	121,49
	Provinsi Papua	247,91	239,98	229,82	227,90	218,59

**Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota se-Papua
Tahun 2014-2019**

No.	Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Mierambe	67,33	67,75	68,09	68,64	69,38	69,98
2	Jayawijaya	53,37	54,18	54,96	55,99	56,82	57,79
3	Jayapura	69,55	70,04	70,50	70,97	71,25	71,84
4	Nabire	66,25	66,49	66,64	67,11	67,70	68,53
5	Kepulauan Yapen	64,89	65,28	65,55	66,07	67,00	67,76
6	Biak Numfor	70,32	70,85	71,13	71,56	71,96	72,57
7	Paniai	53,93	54,20	54,34	54,91	55,83	56,58
8	Puncak Jaya	44,32	44,87	45,49	46,57	47,39	48,33
9	Mimika	70,40	70,89	71,64	72,42	73,15	74,13
10	Boven Digoel	58,21	59,02	59,35	60,14	60,83	61,51
11	Mappi	55,74	56,11	56,54	57,10	57,72	58,30
12	Asmat	45,91	46,62	47,31	48,49	49,37	50,37
13	Yahukimo	46,36	46,63	47,13	47,95	48,51	49,25
14	Pegunungan Bintang	39,68	40,91	41,90	43,24	44,22	45,21
15	Tolikara	46,16	46,38	47,11	47,89	48,85	49,68
16	Sarmi	60,48	60,99	61,27	62,31	63,00	63,45
17	Keerom	62,73	63,43	64,10	64,99	65,75	66,59
18	Waropen	61,97	62,35	63,10	64,08	64,80	65,34
19	Supiori	59,70	60,09	60,59	61,23	61,84	62,30
20	Memberamo Raya	47,88	48,29	49,00	50,25	51,24	52,20
21	Meluga	25,38	25,47	26,56	27,87	29,42	30,75
22	Lanny Jaya	43,28	44,18	45,16	46,49	47,34	48,00
23	Memberamo Tengah	43,19	43,55	44,15	45,50	46,41	47,23
24	Yalimo	44,21	44,32	44,95	46,19	47,13	48,08
25	Puncak	38,05	39,41	39,96	41,06	41,81	42,70
26	Dogiyai	52,25	52,78	53,32	54,04	54,44	55,41
27	Intan Jaya	43,51	44,35	44,82	45,68	46,55	47,51
28	Deiyai	48,12	48,28	48,50	49,07	49,55	50,11
29	Kota Jayapura	77,86	78,05	78,56	79,23	79,58	80,16
	Provinsi Papua	56,75	57,25	58,05	59,09	60,06	60,84



**PNRB Perkapita (Dengan Pertambahan dan Penggalian) Kabupaten/Kota se-Papua
Tahun 2015-2019 (Rupiah)**

No.	Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Merauke	47.811.023,59	53.078.198,97	57.658.155,57	64.359.622,91	70.397.850,85
2	Jayawijaya	26.251.551,45	29.161.656,98	31.966.401,39	35.368.758,14	38.275.422,56
3	Jayapura	82.174.652,54	92.994.178,45	102.331.005,50	112.993.276,64	124.649.607,06
4	Nabire	54.980.416,67	60.346.153,97	65.361.352,34	69.969.071,29	73.844.214,39
5	Kepulauan Yapen	32.962.336,88	35.946.633,63	38.005.195,82	40.114.737,62	41.891.125,64
6	Biak Numfor	35.522.006,57	35.627.422,40	34.499.144,50	34.930.879,39	35.931.503,84
7	Paniai	17.759.824,71	19.599.038,08	20.741.036,90	22.462.852,42	23.577.707,13
8	Puncak Jaya	8.908.036,01	9.384.126,04	9.766.576,66	10.316.102,78	10.879.666,64
9	Mimika	268.986.190,59	315.981.759,90	352.769.406,16	395.993.721,40	249.588.089,35
10	Boven Digoel	56.274.175,87	60.582.064,59	64.411.696,37	67.525.651,17	70.677.033,39
11	Mappi	21.076.162,88	23.205.239,84	25.654.125,49	26.852.982,87	28.593.340,45
12	Asmat	18.500.627,90	20.286.651,41	21.938.123,87	23.626.517,20	25.332.340,55
13	Yahukimo	9.373.344,49	10.015.819,06	10.956.991,82	11.803.069,86	12.678.921,54
14	Pegunungan Bintang	18.274.902,13	20.274.951,77	22.051.088,02	23.714.522,47	25.274.928,02
15	Tolikara	8.599.098,44	9.223.135,51	9.861.303,81	10.634.936,38	11.460.620,10
16	Sarmi	50.008.966,04	54.872.042,05	59.990.021,67	64.315.850,93	69.493.986,36
17	Keerom	39.483.966,54	43.158.726,32	46.182.136	48.422.111,60	50.001.005,66
18	Waropen	49.936.092,92	55.600.644,53	59.792.941,40	62.601.875,94	64.974.306,46
19	Supiori	42.162.729,85	44.922.394,76	46.754.638,83	47.299.853,33	48.564.092,44
20	Memberamo Raya	48.078.905,95	54.489.881,63	59.778.066,95	63.708.877,65	69.146.155,17
21	Nokya	8.580.085,51	9.474.740,84	10.504.868,10	11.469.337,55	12.336.461,90
22	Lanny Jaya	7.154.441,68	7.912.642,87	8.661.891,10	9.435.175,66	10.210.123,90
23	Memberamo Tengah	17.391.828,66	19.265.806,98	20.823.205,72	22.468.981,84	24.140.397,50
24	Yalimo	13.710.592,18	15.317.323,67	16.559.570,23	18.254.273,14	19.507.600,03
25	Puncak	8.704.367,30	9.756.558,61	10.667.499,68	11.569.147,43	12.372.489,93
26	Dogiyai	9.710.998,26	10.680.684,94	11.566.519,52	12.501.427,55	13.385.606,52
27	Intan Jaya	19.428.069,39	21.579.591,89	22.489.277,23	24.251.939,80	25.334.287,41
28	Deiyai	13.274.000,97	15.053.256,09	16.028.574,07	17.484.748,86	18.968.780,59
29	Kota Jayapura	81.574.706,76	90.135.176,33	95.737.108,34	102.137.694,75	108.618.958,95

* angka sementara

** angka sementara

DATA
MENCERDASKAN BANGSA
Enlighten The Nation



BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI PAPUA
Statistics of Papua Province

Jl. DR. Samratulangi Dok II Jayapura 99112
Telp. (0967) 533028, 534519 Fax. (0967) 536490
E-mail: bps9400@bps.go.id Homepage: <http://papua.bps.go.id>

ISSN 2477-4472



9 772477 447008